



**PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN**

**TAHUN 2025**

**RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA  
(RENJA) DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN  
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA  
TAHUN 2025**



**DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA  
BERENCANA TAHUN 2024**

## KATA PENGANTAR



Puji dan syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya sehingga penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Kabupaten Humbang Hasundutan dapat menyelesaikan Tahun 2025 ini dapat diselesaikan. Penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) ini merupakan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Peraturan Pemerintah Daerah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Dalam peraturan peraturan tersebut diamanatkan bahwa dalam rangka penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), kepala perangkat daerah selaku pengguna anggaran menyusun rencana kerja dan anggaran perangkat daerah tahun berikutnya. Dalam urusan Kesehatan, Rancangan Akhir Rencana Kerja ini memuat kegiatan yang diharapkan menjadi solusi dari persoalan, masalah serta isu yang sedang dan diperkirakan akan terjadi.

Pada akhirnya kami berharap agar Rancangan Awal Rencana Kerja ini dapat bermanfaat dan dijadikan panduan serta acuan bagi pegawai Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Kabupaten Humbang Hasundutan dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta peranannya masing-masing dalam upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

**Doloksanggul, Juli 2024**

**Plt. Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian  
Penduduk dan Keluarga Berencana,**

**dr. Gunawan P Sinaga  
Pembina  
NIP. 198506202011011013**

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	1
DAFTAR ISI.....	2
BAB I.....	3
PENDAHULUAN.....	3
1.1 Latar Belakang.....	3
1.2 Landasan Hukum.....	6
1.3.Maksud dan Tujuan.....	8
1.4 Sistematika Penulisan.....	9
BAB II.....	11
HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023.....	11
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.....	11
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.....	31
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.....	54
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD.....	56
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	54
BAB III.....	56
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN.....	56
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Kebijakan Pemerintah Daerah Propinsi Sumatera Utara.....	56
3.1.1. Struktur Organisasi.....	57
3.1.2 Susunan Kepegawaian.....	58
3.1.3 Tugas Pokok dan Fungsi.....	59
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah.....	68
3.3. Program dan Kegiatan.....	69
3.3.1 Faktor-faktor yang menjadi Bahan Pertimbangan terhadap Rumusan Program dan Kegiatan.....	69
BAB IV.....	72
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.....	72
4.1. Program dan Kegiatan Prioritas Perangkat Daerah.....	72
4.2. Program dan Kegiatan Perangkat Daerah.....	73
PENUTUP.....	80
5.1. Kesimpulan.....	80
5.2 Saran.....	80

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menegaskan bahwa Perencanaan Pembangunan Nasional menjadi Dasar bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Perencanaan yang spesifik. Untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, efisien dan efektif diperlukan perencanaan yang matang dan terarah. Perencanaan disusun baik di Tingkat Pusat maupun Daerah, berupa Rencana Pembangunan Jangka Panjang, Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Rencana Pembangunan Tahunan.

Rencana Kerja perangkat daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perencanaan pembangunan nasional dan pembangunan daerah, Oleh karena itu berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka setiap perangkat daerah wajib menyusun Rencana Kerja.

Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah Kesehatan, Penegendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun Anggaran 2025 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2021-2026

Masalah kesehatan di Kabupaten Humbang Hasundutan sampai saat ini masih menjadi masalah yang kompleks yang perlu mendapat perhatian dari pemerintah. Masalah kesehatan merupakan salah satu prioritas Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan. Sesuai dengan Misi pertama Bupati Humbang Hasundutan yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Humbang Hasundutan tahun 2021-2026 yaitu mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas melalui peningkatan mutu layanan pendidikan dan kesehatan. Mutu pelayanan kesehatan diukur dari berbagai aspek, diantaranya status kesehatan masyarakat, kondisi ketenagaan (SDM Kesehatan), serta sarana dan prasarana kesehatan. Secara rinci kondisi aspek tersebut di Kabupaten Humbang Hasundutan adalah sebagai berikut:

## A. Status Kesehatan

Pembangunan kesehatan di Kabupaten Humbang Hasundutan yang dilaksanakan secara berkesinambungan telah berhasil meningkatkan status kesehatan masyarakat. Kinerja sistem kesehatan telah menunjukkan peningkatan, antara lain ditunjukkan dengan peningkatan status kesehatan, yaitu: Prevalensi Balita Stunting di Kabupaten Humbang Hasundutan tahun 2023 adalah sebesar 8,59 %. Angka Kematian bayi tahun 2023 adalah sebesar 9,66/1.000 Kelahiran Hidup atau 24 kasus dari 2.484 kelahiran hidup. Sedangkan kasus kematian Ibu pada tahun 2023 adalah sebanyak 2 (dua) Kasus dari 3.259 ibu hamil. Sedangkan untuk total fertility rate (TFR) berada pada angka 2,65 yang artinya jumlah kelahiran bagi perempuan usia 15-49 tahun di Kabupaten Humbang Hasundutan sebanyak 2-3 orang.

## B. Kondisi SDM Kesehatan

Tahun 2023, jumlah seluruh SDM kesehatan di Kabupaten Humbang Hasundutan adalah sebanyak 811 orang. Jumlah SDM Kesehatan sesuai dengan jumlah penduduk sebenarnya sudah terpenuhi, namun distribusi SDM Kesehatan tersebut belum merata di seluruh Fasyankes yang ada di Kabupaten Humbang Hasundutan. Berikut adalah data jumlah tenaga medis dan paramedis di Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2023.

Tabel 1.1.  
Jumlah Tenaga Medis dan Paramedis Tahun 2023

NO	URAIAN	2023
1	Dokter Spesialis	
1.1.	Dokter Spesialis Bedah	2
1.2.	Dokter Spesialis Anak	2
1.3.	Dokter Spesialis Obgyn	2
1.4.	Dokter Spesialis Penyakit Dalam	3
1.5.	Dokter Spesialis Anestesi	2
1.6.	Dokter Spesialis Radiologi	1
1.7.	Dokter Spesialis Patologi Klinik	1
1.8	Dokter Spesialis THT	1
1.9.	Dokter Spesialis Mata	1
1.10	Dokter Spesialis Neurologi	1

	1.11	Dokter Spesialis Paru	1
	1.12	Dokter Spesialis Rehabilitasi Medik	0
	1.13	Dokter Gigi Spesialis Bedah Mulut	1
	1.14	Dokter Spesialis Jiwa	2
	1.15	Dokter Spesialis Kulit	1
	1.16	Dokter Spesialis Jantung	1
	1.17	Dokter Spesialis Forensik	1
	1.19	Dokter Spesialis Patologi Anatomi	1
2	1.1.	Dokter Umum	44
	1.2	Dokter Gigi	10
3	Paramedis		
	3.1.	Bidan	352
	3.2.	Perawat	266
	3.3	Tenaga Kesehatan Lainnya	115

Rasio tenaga dokter spesialis di Kabupaten Humbang Hasundutan sebenarnya sudah memenuhi standar minimal, namun untuk rasio dokter umum masih belum memenuhi standar. Menurut WHO rasio dokter umum dan penduduk idealnya 1:1000. Rasio ini menunjukkan harus ada 1 dokter untuk melayani 1.000 penduduk di satu daerah. Menurut Kementerian Kesehatan kondisi ideal rasio dokter umum per 100.000 penduduk di Indonesia adalah 48 per 100.000 penduduk atau 1 orang dokter melayani 2.100 penduduk. Sementara Rasio Dokter umum di kabupaten Humbang berada pada angka 21,49 per 100.000 penduduk yang artinya satu orang dokter melayani 4.652 penduduk. Hal ini menunjukkan masih kurangnya tenaga dokter umum di Kabupaten Humbang Hasundutan. Untuk rasio tenaga bidan di Kabupaten Humbang Hasundutan sudah sesuai standar. Menurut WHO rasio bidan adalah 100 per 100.000 penduduk sementara di Kabupaten Humbang Hasundutan rasio bidan adalah 172 per 100.000 penduduk dan rasio perawat adalah 130 per 100.000 penduduk. Untuk mengantisipasi kekurangan tenaga kesehatan di Kabupaten Humbang Hasundutan selalu berusaha memenuhi kebutuhan SDM kesehatan melalui perekrutan tenaga kesehatan melalui perjanjian kerja.

Petugas PLKB juga masih belum mencukupi, jumlah tenaga PLKB yang dimiliki saat ini hanya 26 orang (10 orang PNS dan 2 orang PLKB Non PNS dan 14 Orang PLKB Pusat ) sebagai ujung tombak pelayanan KB yang mencakup 154 desa/kelurahan. Kondisi ini sangat jauh dari standar rasio ketersediaan PLKB dimana 1 PLKB seharusnya menangani program Bangga Kencana di 2 desa.

### C. Kondisi Sarana Pelayanan Kesehatan

Sarana pelayanan kesehatan di Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2023 adalah Puskesmas 12 unit (3 unit diantaranya Puskesmas Rawat Inap), Puskesmas Pembantu 23 unit, Pos Kesehatan Desa 167 unit, dan Posyandu sebanyak 254 unit.

Tabel. 1.2  
Jumlah Sarana Pelayanan Kesehatan Tahun 2023

NO	URAIAN	2023
1	Jumlah Puskesmas	12
2	Jumlah Klinik	10
3	Jumlah Pustu	23
4	Jumlah Poskesdes	167
5	Jumlah Balai Penyuluhan KB	10
6	Jumlah Posyandu Balita	254
6	Jumlah Penduduk	204.711

Dari rasio sarana kesehatan terhadap jumlah penduduk diketahui bahwa 12 Puskesmas sudah mencukupi dari segi kuantitasnya, dimana standard masyarakat yang dilayani satu puskesmas maksimal 30.000 orang, sedangkan Puskesmas di Kabupaten Humbang Hasundutan masih melayani 17.059 orang. Untuk Puskesmas Pembantu juga telah mencukupi dimana maksimal yang dilayani adalah 10.000 orang, dan jumlah masyarakat yang dilayani masih 8.900 orang. Dan untuk Poskesdes juga telah merata di 154 desa kelurahan dengan total jumlah poskesdes 167 unit, dimana ada desa yang memiliki poskesdes lebih dari 1 unit, hal ini disebabkan kondisi wilayah/jarak sarana kesehatan yang terlalu jauh dari pemukiman penduduk.

#### 1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2024 memperhatikan arah dan garis kebijakan terkait yang telah dirumuskan sebagai landasan hukumnya, antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di

- Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4272) ;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
  3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
  4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan

- Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68);
  11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 tahun 2021 tentang hasil verifikasi, validasi dan inventarisasi klasifikasi, kodifikasi, dan nomenklator perencanaan pembangunan dan keuangan daerah
  12. Peraturan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2023 Nomor 7);
  13. Peraturan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan (Lembaran Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2021 Nomor 2);
  14. Peraturan Bupati Humbang Hasundutan Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Humbang Hasundutan;
  15. Peraturan Bupati Humbang Hasundutan Nomor 15 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2024 Nomor 15).

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

#### **1.3.1 Maksud**

Rencana Kerja Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Humbang Hasundutan ini disusun dengan maksud untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan dalam OPD serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah. Rencana Kerja (Renja)

memuat program kegiatan dan sub kegiatan prioritas, lokasi dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

### **1.3.2 Tujuan**

- a. Menjabarkan rencana strategis ke dalam rencana operasional sesuai program, kegiatan dan prioritas pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2025 yang obyektif, realistis dan proporsional
- b. Memelihara konsistensi antara capaian tujuan perencanaan strategis jangka menengah dengan tujuan perencanaan dan penganggaran tahunan perangkat daerah;
- c. Mengukur kinerja penyelenggaraan fungsi dan urusan perangkat daerah melalui capaian target kinerja program dan kegiatan pembangunan;
- d. Membangun komitmen aparatur Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana untuk bekerja lebih baik;
- e. Menyediakan informasi bagi pemenuhan laporan evaluasi.

## **1.4 Sistematika Penulisan**

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5. Penelaahan Pokok-pokok Pikiran DPRD, Usulan Program dan Kegiatan Oleh Masyarakat

### BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Kebijakan Pemerintah Daerah Propinsi Sumatera Utara

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

3.3. Program dan Kegiatan

### BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1. Program dan Kegiatan Prioritas Perangkat Daerah

4.2. Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

### BAB V. PENUTUP

## BAB II

### HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

#### 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Pengukuran Kinerja Dinas Kesehatan merupakan proses sistematis yang berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tujuan, sasaran, strategi kebijakan dan program yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan tujuan Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Humbang Hasundutan. Pengukuran Kinerja dilakukan pada Indikator tujuan, sasaran yang telah direncanakan dalam RENSTRA maupun RENJA, kemudian dibandingkan dengan realisasi dari pelaksanaan Program dalam rangka mencapai target indikator sasaran tersebut. Evaluasi terhadap Rencana Kerja Dinas Kesehatan, pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana meliputi realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, realisasi program atau kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan dan realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan. Pengukuran kinerja pada sasaran tahun 2023 telah dilakukan dengan hasil bahwa sebagian besar indikator sudah dapat mencapai target yang diharapkan, bahkan beberapa indikator melebihi target yang ditetapkan. Hasil pengukuran kinerja indikator sasaran dapat diuraikan sebagai berikut:

No	Tujuan/Sasaran	Indikator	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian	Ket
1	Menurunnya Kasus Kematian Ibu, Angka Kematian Bayi, dan Angka Kesakitan	Crude Death Rate	3,10	3,87	75,11	Baik
2	Meningkatnya status Gizi Masyarakat	Prevalensi Balita Stunting	14	8,59	138,64%	Sangat Baik
3	Menurunnya angka Kelahiran	Total Fertility Rate	2,53	2,65	95,26%	Baik
4	Meningkatnya system akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah	Nilai Evaluasi oleh APIP	A	A	100%	Baik

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa rata-rata capaian Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2023 mencapai target yang ditetapkan, bahkan ada yang melebihi target yang ditetapkan yaitu pada indikator Prevalensi Balita stunting

dengan capaian kinerja 138,64% atau dengan intepretasi sangat baik. Menurunnya prevalensi balita stunting di Kabupaten Humbang Hasundutan tidak terlepas dari kerja keras seluruh tenaga kesehatan, kepala desa beserta jajarannya, kader kesehatan, dan komitmen serius dari Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan.

Capaian indikator tersebut diperoleh dari berbagai capaian program dan kegiatan pada tahun 2023 Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Humbang Hasundutan dengan uraian sebagai berikut:

**a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**

Kegiatan :

1. Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Pemerintahan
3. Administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah
4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
5. Administrasi Umum Perangkat Daerah
6. Penyediaan Jasa penunjang Urusan Daerah
7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Realisasi Program dan Kegiatan :

1. Tersedianya dokumen perencanaan dan dokumen evaluasi kinerja Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2023
2. Tersedianya jasa administrasi keuangan di Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Humbang Hasundutan berupa pembayaran honorarium PPK, Bendahara Penerimaan, dan Bendahara Pengeluaran. dan Bendahara Barang, serta petugas kebersihan 13 orang selama 12 bulan;
3. Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik di Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana berupa pembayaran tagihan listrik, air, dan surat kabar selama 12 bulan;

4. Tersedianya alat tulis kantor selama 12 bulan di Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Humbang Hasundutan;
5. Tersedianya cetak dan penggandaan selama 12 bulan di Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Humbang Hasundutan;
6. Tersedianya makanan dan minuman di Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Humbang Hasundutan berupa belanja makanan dan minuman rapat selama 12 bulan;
7. Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi berupa perjalanan dinas dalam daerah, perjalanan dinas ke provinsi dan luar provinsi selama 12 bulan;

**b. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat**

Kegiatan :

1. Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota
2. Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
3. Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi
4. Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D serta Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Realisasi Program dan Kegiatan :

1. Tersedianya obat dan bmhp yang didistribusikan ke 12 Puskesmas di Kabupaten Humbang Hasundutan
2. Tersedianya PMT ibu hamil sebanyak 677 kotak yang diserahkan kepada bumil KEK (kekurangan energi kronik) di Kabupaten Humbang Hasundutan
3. Tersedianya PMT balita sebanyak 1250 kotak yang diserahkan kepada balita gizi kurang
4. Tersedianya IVA test sebanyak 12 Paket, stick gula 12 Paket, yang didistribusikan ke 12 Puskesmas, dan Reagen Pemeriksaan kimia darah sebanyak 10 Paket, yang didistribusikan ke 10 Puskesmas, serta CO-

analyzer sebanyak 4 paket untuk 4 Puskesmas di Kabupaten Humbang Hasundutan

5. Tersedianya Makanan Tambahan Berbahan pangan lokal untuk ibu hamil resiko tinggi dan balita gizi kurang sebanyak 12 paket selama 12 bulan di Puskesmas
6. Tersedianya makanan tambahan untuk lansia sebanyak 450 kotak yang didistribusikan ke 12 puskesmas
7. Tersedianya PMT TB Paru yang diserahkan kepada Penderita TB Paru sebanyak 2973 kotak dancow untuk 278 Penderita TB dan 576 kotak diabetasol untuk 48 Penderita TB di Kabupaten Humbang Hasundutan
8. Tersedianya dana Bantuan Operasional Kesehatan bagi 12 Puskesmas dan Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

#### **c. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan**

Kegiatan :

1. Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM Manusia di Wilayah Kabupaten/Kota
2. Pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi teknis sumber daya manusia kesehatan tingkat daerah kabupaten/kota

Realisasi Program dan Kegiatan :

1. Terlaksananya penyediaan SDM Kesehatan melalui perjanjian kerja sebanyak 12 (dua belas) orang dari DAU yang bertujuan untuk memenuhi SDM kesehatan di 12 Puskesmas.
2. Terlaksananya peningkatan kapasitas tenaga kesehatan melalui pelaksanaan uji kompetensi bagi tenaga fungsional

#### **d. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman**

Kegiatan :

1. Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga

2. Pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan penerbitan sertifikat laik hygiene sanitasi tempat pengolahan makanan (TPM) antara lain jasa boga, rumah makan/restoran dan depot air minum (DAM)

Realisasi Program dan Kegiatan :

1. Terlaksananya penambahan kapasitas bagi 20 orang pemilik Industri Rumah Tangga Pangan di Kabupaten Humbang Hasundutan
2. Terlaksananya pembinaan kepada 30 pengusaha pengolahan makanan, jasa boga, rumah makan dan depot air minum di Kabupaten Humbang Hasundutan

#### **e. Program Keluarga Berencana**

1. Terpenuhinya honorarium tenaga penyuluh KB non ASN sebanyak 4 orang
2. Terpenuhinya operasional kader sebanyak 308 orang
3. Pengadaan bhp untuk kegiatan pemasangan alkon

#### **f. Program Pengendalian Penduduk**

1. Sistem Informasi Keluarga telah dilaksanakan di 10 kecamatan kabupaten Humbang Hasundutan;
2. Operasional KIE oleh PPKBD dan Sub PPKBD di Posyandu, terlaksananya KIE di posyandu oleh PPKBD dan Sub PPKBD di 154 desa/kelurahan
3. Pembinaan Kampung KB telah dilaksanakan dan cukup berhasil, dengan dilaksanakannya pertemuan Kelompok Kerja, Lokakarya Mini dan Forum Musyawarah Tingkat Desa di 13 desa se-kabupaten Humbang Hasundutan,
4. Jejaring kemitraan terlaksana kepada tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, dan akedimisi, sebanyak 20 Kelompok Mitra Kerja.
5. Operasional KIE oleh PPKBD dan Sub PPKBD di Posyandu, terlaksananya KIE di posyandu oleh PPKBD dan Sub PPKBD di 154 Desa Kabupaten Humbang Hasundutan,
6. Tersedianya operasional rumat data sebanyak 1 unit

**g. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)**

1. Tersedianya Sarana KIE Program KKBPk yaitu pengadaan leaflet sebanyak 8000 lembar, cetak poster 3000 buah, cetak spanduk sebanyak 675 meter, dan baliho 150 meter.
2. Operasional balai KB sebanyak 10 unit
3. Tersedianya BKB kit sebanyak 20 unit, Formulir R1 sebanyak 15.000 lembar, kaos berkerah sebanyak 550 buah

Secara keseluruhan evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) tahun 2023 tertera pada Tabel T-C. 29 di bawah ini:

**REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH DAN PENCAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2023  
DINAS KESEHATAN KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN**

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
				Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN</b>									
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH</b>	<i>Indeks kepuasan ASN terhadap dukungan manajemen perkantoran</i>								
<b>Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Dokumen perencanaan yang sesuai renstra</b>	95	<b>92%</b>	95%	95%	100,00	95%	60 %	60
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat daerah	10 Dokumen	4 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100,00	2 Dokumen	6 Dokumen	60
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	10 Dokumen	4 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100,00	2 Dokumen	6 Dokumen	60
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	20 Dokumen	8 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	100,00	4 Dokumen	12 Dokumen	60
<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase pembayaran gaji dan tunjangan serta penyampaian laporan keuangan tepat waktu</b>	95		95%	95%	100,00	95%	95%	100
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	650 Orang	620 Orang	620 Orang	620 Orang	100,00	620 Orang	620 Orang	100

Koordinasi dan penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semster SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKP dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	80 Dokumen	32 Dokumen	16 Dokumen	16 Dokumen	100,00	16 Dokumen	48 Dokumen	60
<b>Administrasi barang milik daerah</b>	<b>Persentase ketepatan penyusunan laporan barang milik daerah</b>	95%	<b>90%</b>	95%	95%	100,00	95%	60%	60
Rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	65 Laporan	26 Laporan	13 Laporan	13 Laporan	100,00	13 Laporan	39 Laporan	60
<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase pemenuhan administrasi umum</b>	95 Persen	<b>90%</b>	95%	95%	100,00	95%	60%	61,12
Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	75 Paket	30 Paket	15 Paket	15 Paket	100,00	15 Paket	45 Paket	60
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	275 Paket	106 Paket	55 Paket	55 Paket	100,00	55 Paket	161 Paket	58,5
Penyediaan Bahan logistik kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	20 Paket	8 Paket	4 Paket	4 Paket	100,00	4 Paket	12 Paket	60
Penyediaan barang cetakan dan pengadaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	60 Paket	30 Paket	12 Paket	12 Paket	100,00	12 Paket	42 Paket	70
Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	70 Laporan	26 Laporan	14 Laporan	14 Laporan	100,00	14 Laporan	40 Laporan	57,1
<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian</b>	95%	<b>90%</b>	95%	95%	100,00	95%	68%	71,6
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	100 Orang	48 Orang	20 Orang	20 Orang	100,00	20 Orang	68 Orang	68

Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Jumlah SDM yang ditingkatkan kemampuannya melalui pelatihan dan bimbingan teknis	35 Orang	-	10 Orang	10 Orang	100,00	10 Orang	10 Orang	28,57
<b>Penyediaan Jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase pemenuhan kebutuhan atas jasa, sarana dan prasarana kantor</b>	95%	<b>90%</b>	95%	95%	100,00	95%	95%	100
Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100,00	1 Laporan	2 Laporan	40
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	30 Laporan	6 Laporan	6 Laporan	6 Laporan	100,00	6 Laporan	9 Laporan	30
Penyediaan Jasa pelayanan umum kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	10 Laporan	4 Laporan	2 laporan	2 laporan	100,00	2 laporan	6 laporan	60
<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase barang milik daerah yang dipelihara</b>	95%	<b>90%</b>	95%	95%	100,00	95%	39,6%	41,6
Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	85 unit	15 unit	5 unit	5 unit	100,00	17 Unit	32 Unit	37,6
Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	520 unit	238 unit	88 unit	88 unit	100,00	104 Unit	342 Unit	65,8
Pemeliharaan/Rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	13 Unit	1 unit	2 unit	1 unit	50,00	1 unit	2 unit	15,38
<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>	<b>Persentase Puskesmas yang terakreditasi Madya</b>	100%	<b>75%</b>	90%			75%	75%	100
<b>Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota</b>	<b>Persentase puskesmas yang memiliki sarana dan prasarana sesuai standar</b>	85%		75%	75%	100,00	75%	71,39%	71,39
Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	1 Unit	-	1 unit	1 unit	100,00	1 unit	1 unit	100

Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat kesehan/alat penunjang medik yang tersedia	12 Paket	5 Paket	5 Paket	5 Paket	100,00	5 Paket	5 Paket	41,67
Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center		-	12 Paket	12 Paket	100,00	12 Paket	12 Paket	100
Pengadaan Obat, Vaksin	Persentase ketersediaan Obat dan Vaksin	92%	80%	90	80	88,89	80	80	88,89
Pengadaan Bahan Habis Pakai	Persentase ketersediaan Bahan Habis Pakai	92%	80%	90	80	88,89	80	80	88,89
Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Persentase Ketersediaan Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dilakukan Pemeliharaan	97%	80%	85	85	100,00	85	85	100
Pemeliharaan rutin dan berkala alat kesehatan/alat penunjang Medik Fasilitas Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	12 Unit	5 Unit	0	0	0,00	0	5 unit	41,67
Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman yang Didistribusikan ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Paket		12 paket	12 paket	100,00	12 paket	12 paket	100
<b>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase pelayanan UKM dan UKP Rujukan</b>	84%		85%	77,48	91,00	80%	80%	100
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan	4138 Orang	3237 orang	3752 orang	3259 Orang	79,33	3752 Orang	3259 Orang	78,75

	Kesehatan Sesuai Standar								
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	3790 orang	2500 Orang	3556 Orang	2479 Orang	70,22	3556 Orang	2479 Orang	65,4
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	3530 orang	2478 Orang	3386 Orang	2466 Orang	<b>72,83</b>	3386 orang	2466 orang	69,65
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	14500 orang	12718	16.802	14.035 Orang	83,53	16802 orang	14035 orang	83,53
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada anak Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	50000 orang		42356	41714	98,48	42356	41714	98,48
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	130000 Orang	25750	94.040	86.616	92,11	94.040	86.616	66,6
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	24324 orang	23066	29160	24.790	85,01	29160	24.790	100
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada penderita hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	14473 orang	11230	55.582	45.412	81,7	55.582	45.412	81,7
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada penderita DM	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	750 orang	570	942	763	81	942	763	81
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	3200 orang	294	3445	2873	83,3	3445	2873	83,3
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan orang dengan resiko terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	3200 orang	1800	5.779	3.268	56,55	5.779	3.268	56,55
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan	12 dokumen	12 dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	100,00	12 Dokumen	12 Dokumen	100

Masyarakat	Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat								
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	533 orang	154	277	222	80,14	277	222	41,65
Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 dokumen	12 dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	100,00	12 Dokumen	12 Dokumen	100
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 dokumen	12 dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	100,00	12 Dokumen	12 Dokumen	100
Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	12 dokumen	12 dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	100,00	12 Dokumen	12 Dokumen	100
Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 dokumen	12 dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	100,00	12 Dokumen	12 Dokumen	100
Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	25000 Dokumen		25.000 Dokumen	24.650 Dokumen	98,6	25.000 Dokumen	24.650 Dokumen	98,6
Operasional Rumah Sakit	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	122 dokumen	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00	1 Dokumen	1 Dokumen	100
Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 dokumen	12 dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	100,00	12 Dokumen	12 Dokumen	100
Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	12 dokumen	5 dokumen	13 Unit	13 Unit	100,00	13 Unit	13 Unit	100
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	35.000 RT	35.000 RT	35.000 RT	35.000 RT	100,00	35.000 RT	35.000 RT	100

<b>Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi</b>	<b>Persentase Puskesmas yang menyampaikan laporan yang sesuai standar dan tepat waktu</b>	94%	<b>90%</b>	93	90	96,77	100%	100%	60
Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	185 Dokumen	37 Dokumen	37 Dokumen	37 Dokumen	100,00	37 Dokumen	111 Dokumen	60
<b>Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D serta fasilitas pelayanan kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase Faskes yang melaksanakan pelayanan kesehatan sesuai standar</b>	100%		75	75%	100%	75%	75%	100
Peningkatan mutu pelayanan fasilitas Kesehatan	Jumlah Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar	13 Fasyankes	-	13 Fasyankes	13 Fasyankes	100%	13 Unit	13 Unit	100
<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN</b>	<b>Persentase Puskesmas yang memiliki 9 jenis tenaga kesehatan sesuai kompetensi</b>	67%		42%	33,0%	78,57	25%	25%	100
<b>Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM Manusia di Wilayah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah Puskesmas yang memiliki 9 jenis tenaga kesehatan</b>	12 Puskesmas		4 Puskesmas	4 Puskesmas	100,00	3 Puskesmas	3 Puskesmas	100
Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	62 orang	59 Orang	16 orang	12 orang	75	12 Orang	12 Orang	100
Pembinaan dan pengawasan Sumber daya manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	16 Dokumen	-	12 Puskesmas	12 Puskesmas	<b>100,00</b>	12 Puskesmas	12 Puskesmas	100
<b>Pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi teknis sumber daya manusia kesehatan tingkat daerah kabupaten/kota</b>	<b>Persentase SDM yang bermutu dan sesuai kompetensi</b>	78%		39	39%	<b>100,00</b>	75%	75%	100

Pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi teknis sumber daya manusia kesehatan tingkat daerah kabupaten/kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	546 orang		60 orang	54 orang	90	60 orang	54 orang	90
<b>PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN</b>	<b>Persentase sediaan farmasi, alat kesehatan dan pengawasan makanan/minuman yang sesuai standar</b>	60%		45		0,00	65%	65%	100
<b>Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)</b>	<b>Persentase Apotek, Toko Obat, Optik dan UMOT yang memiliki izin</b>	80%		80		<b>0,00</b>	80%	80%	100
<i>Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)</i>	<i>Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)</i>	80 Dokumen		45 Dokumen	30 Dokumen	66,67	45 Dokumen	30 Dokumen	37,5
<b>Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga</b>	<b>Persentase IRTP yang memiliki SP-PIRT</b>	30%		65	65	100	65%	65%	100
<i>Pengendalian dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT Sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat</i>	<i>Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah</i>			45 Dokumen	45 Dokumen	100	45 Dokumen	45 Dokumen	100

Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)								
<b>Penerbitan sertifikat laik higiene sanitasi tempat pengolahan makanan (TPM) antara lain jasa boga, Rumah Makan/Restoran, dan Depot Air Minum (DAM)</b>	<b><i>Persentase TPM yang memiliki sertifikat laik higiene sanitasi</i></b>			0,45			45%	45%	100
Pengendalian dan pengawsan serta tindak lanjut pengawasan penerbitan sertifikat laik higiene sanitasi tempat pengolahan makanan (TPM) antara lain jasa boga, Rumah Makan/Restoran, dan Depot Air Minum (DAM)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)			30 Dokumen		0,00	30 Dokumen	30 Dokumen	100
<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA</b>						0,00			100
<b>PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK</b>	Jumlah Kebijakan Yang Mendukung Pembangunan Pengendalian Penduduk	2 MoU	<b>1 MOU</b>	2 MOU	1 MOU	50%	2 MOU	2 MOU	100
<b>Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Dalam Rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk</b>	<b>Persentase Sektor Pendukung Kebijakan Pengendalian Penduduk</b>	2 Sektor	<b>2 Sektor</b>	2 Sektor	2 Sektor%	100%	2 Sektor	2 Sektor	100
Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota terhadap Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (Program KKBPK)	Jumlah pertemuan lintas sektor di tingkat Kabupaten	5 Kegiatan		1 Keg	1 Keg	<b>100</b>	1 Keg	1 Keg	100
Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal	Jumlah Sekolah Siaga Kependudukan Yang terbentuk	15 Sekolah	3 Sekolah	3 Sekolah	1 sekolah	33,33	3 Sekolah	3 Sekolah	20

<b>Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota</b>	<b>Persentase Data Mikro Keluarga</b>	100%		<b>65%</b>			<b>68%</b>	<b>68%</b>	100
Membentuk Rumah Data Kependudukan Di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program KKBPK di Sektor Lain	Jumlah Rumah Data yang difasilitasi	1 Rumah Data	0	1 Rumah Data	2 Rumah Data	0,00	1 Rumah Data	1 Rumah Data	100
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Jumlah PLKB, PPKBD dan Sub PPKBD Pelaksana Sistem Informasi Keluarga	337 Orang	337 orang	337 Peserta	337 orang	100	337 Peserta	337 Peserta	100
PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Persentase Pemakaian Kontrasepsi (CPR)	72%		70%			69%	69%	100
<b>Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal</b>	<b>Persentase Masyarakat Yang Terpapar Isi Program Bangga Kencana</b>	80%		<b>68%</b>			<b>45%</b>	<b>45%</b>	100
Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah Mitra Kerja	16 Mitra Kerja	15 Mitra Kerja	20 Mitra Kerja	20 Mitra Kerja	100,00	20 Mitra Kerja	20 Mitra Kerja	100
Pengelolaan operasional dan sarana di balai penyuluhan KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	10 Laporan	10 Laporan	10 Laporan	10 Laporan	100,00	10 Laporan	10 Laporan	100
Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPK	Jumlah Media Kie	5 Jenis	5 Jenis	5 Jenis	5 Jenis	100,00	5 Jenis	5 Jenis	100
Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini	Jumlah Pertemuan Mekanisme Operasional Program KKBPK	12 Kegiatan	12 Kegiatan	12 Kegiatan	12 Kegiatan	100	12 Kegiatan	12 Kegiatan	100

Lokakarya (Minilok)									
<b>Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/ Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)</b>	<b>Persentase Penyuluh Yang Berperan Aktif</b>	100%		<b>100%</b>			<b>100%</b>	<b>100%</b>	100
Pembinaan IMP dan Program KKBPK di lini lapangan oleh PKB/PLKB	Jumlah PLKB, PPKBD dan Sub PPKBD Peserta Jambore	337 orang	337 orang	337 orang	337 orang	100,00	337 orang	337 orang	100
Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Jumlah Operasional PKB/PLKB	4 orang	4 Orang	4 Orang	4 Orang	100,00	4 Orang	4 Orang	100
<b>Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi Serta Pelaksanaan Pelayanan KB Di Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase Sarana dan Prasarana Yang Tersedia</b>	100%	<b>70</b>	<b>75%</b>	70%	93,33	<b>85%</b>	<b>85%</b>	100
Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	2.559 orang	330	2.559 orang	2.559 orang	371,21	2.559 orang	2.559 orang	100
Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Sarana dan Prasarana Klinik Pelayanan KB	65 Paket	100	12 Paket	12 Paket	100,00	12 Paket	12 Paket	100
<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)</b>	<b>Persentase Keluarga Yang mendapatkan Pembinaan di tiap POKTAN</b>	44%	35	35%	35%	100,00	32%	32%	100
<b>Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga</b>	<b>Persentase keluarga yang aktif dalam ketahanan keluarga</b>	32%	20	23%	20%	86,96	19,46%	19,46%	100
Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Pembinaan Kelompok Ketahanan Keluarga	100 kelompok	40	20 Kelompok	20 Kelompok	100,00	20 Kelompok	20 Kelompok	100

Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan dan kesejahteraan keluarga (BKB, BKR,BKL,PIKR dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/ UPPKS)	Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	800 orang	303	800 orang	800 orang	100,00	194 Kelompok	194 Kelompok	100
---	---	-----------	-----	-----------	-----------	--------	--------------	--------------	-----

## **2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**

Analisis Kinerja Pelayanan SKPD Pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Humbang Hasundutan dilaksanakan dengan mempedomani Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan.

Tolak ukur kinerja Pelayanan Bidang Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan keluarga Berencana tidak terlepas dari Standar Pelayanan Minimum (SPM) Kesehatan. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan, merupakan tolak ukur kinerja Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Humbang Hasundutan. Standar Pelayanan di Bidang Kesehatan ini juga menjadi tolak ukur kinerja Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang telah dimuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan.

Pencapaian target standar pelayanan Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana pada tahun 2023, rata-rata belum mencapai 100 Persen. Hal ini menjadi tantangan yang harus dihadapi oleh Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Namun Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tetap berupaya kedepannya agar Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang kesehatan dapat mencapai 100 %. Pencapaian kinerja Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Humbang Hasundutan pada tahun 2023 sampai triwulan III tertera pada Tabel T-C.30 di bawah ini.



Tabel T-C.30

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Kesehatan, Pengendalian  
Penduduk Dan Keluarga Berencana  
Kabupaten Humbang Hasundutan

NO	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
			Tahun 2022 (thn -2)	Tahun 2023 (thn -1)	Tahun 2024 (thn n)	Tahun 2025 (thn n+1)	Tahun 2022 (thn -2)	Tahun 2023 (Thn n-1)	Tahun 2024 (thn n)	Tahun 2025 (thn n+1)	
1	3	4	5	6	7	8	10		11	12	13
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar	100 %	100%	100%	100%	82,12	79,3%	100%	100%	
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar di fasilitas pelayanan kesehatan	100 %	100%	100%	100%	97,83	70,22%	100%	100%	
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru lahir	Jumlah bayi baru lahir usia 0-28 hari yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai dengan standar	100 %	100%	100%	100%	97,83	72,83%	100%	100%	
4	Peayanan Kesehatan balita	Jumlah Balita usia 12-23 bulan yang mendapat Pelayanan Kesehatan sesuai Standar	100 %	100%	100%	100%	99,50	83,53%	100%	100%	

		+ Jumlah Balita usia 24-35 bulan mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar + Balita									
5	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	100 %	100%	100%	100%	99,72	98,48%	100%	100%	
6	Pelayanan Kesehatan pada usia Produktif	Jumlah orang usia 15–59 tahun di kab/kota yang mendapat pelayanan skrining kesehatan sesuai standar	100 %	100%	100%	100%	46,09	92,11 %	100%	100%	
7	Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah warga negara berusia 60 tahun atau lebih yang mendapat skrining kesehatan sesuai standar minimal 1 kali	100 %	100%	100%	100%	82,36	85.01 %	100%	100%	
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah penderita hipertensi usia >= 15 tahun di dalam wilayah kerjanya yang mendapatkan pelayanan	100 %	100%	100%	100%	30,00	81,70%	100%	100%	

		kesehatan sesuai standar									
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Mellitus	Jumlah penderita diabetes mellitus usia >= 15 tahun di dalam wilayah kerjanya yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100 %	100%	100%	100%	67,91	81%	100%	100%	
10	Pelayanan Kesehatan orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	100 %	100%	100%	100%	45,95	80,14%	100%	100%	
11	Pelayanan Kesehatan orang terduga tuberkulosis	Jumlah orang terduga TBC yang dilakukan pemeriksaan penunjang	100 %	100%	100%	100%	60,85	83,92%	100%	100%	
12	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (HIV)	Jumlah orang dengan risiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan sesuai standar	100 %	100%	100%	100%	54,98	56,55 %	100%	100%	

### **2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah**

Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Humbang Hasundutan tidak lepas dari permasalahan maupun isu-isu yang berkembang secara dinamis baik dalam pemerintahan maupun masyarakat. Eksistensi sebuah institusi bergantung sejauh mana institusi tersebut mampu menemu kenali dan merespon isu strategis dengan berbagai kebijakan dan tindakan yang tepat. Dari evaluasi kinerja Dinas Kesehatan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana dapat disimpulkan bahwa kinerja pelayanan Dinas kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana cukup berhasil karena dari 1 (satu) tujuan yang terbagi dari 5 (lima) sasaran mencapai target yang ditetapkan. Sedangkan 7 (enam) program yang diukur melalui 22 ( dua puluh dua) indikator kegiatan, terdapat 20 indikator dengan capaian  $\geq 80$  %.

Hal kritis / permasalahan yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Humbang Hasundutan diantaranya adalah:

1. Kasus kematian ibu masih menjadi isu penting di Kabupaten Humbang Hasundutan. Kematian ibu merupakan isu nasional dan menjadi target dalam Sustainable Development Goals (SDGs). Kabupaten Humbang Hasundutan memiliki kasus kematian ibu pada tahun 2018 hanya 2 kasus, namun tahun 2019 mengalami kenaikan kasus yaitu sebanyak 5 kasus, tahun 2020 sebanyak 5 kasus, dan tahun 2021 mengalami penurunan menjadi 3 kasus dan pada tahun 2023 hanya terdapat 2 kasus kematian ibu.
2. Angka kematian bayi juga masih membutuhkan perhatian khusus dari Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Humbang Hasudutan. Dimana pada tahun 2023, Angka Kematian bayi tahun 2023 adalah sebesar 9,66/1.000 Kelahiran Hidup atau 24 kasus dari 2.484 kelahiran hidup. Kematian bayi di Kabupaten Humbang Hasundutan lebih banyak diakibatkan oleh kasus asfiksia, berat bayi lahir rendah (BBLR), sepsis dan kelainan bawaan pada bayi.
3. Pada program pencegahan dan pemberantasan penyakit, penyakit infeksi menular masih tetap menjadi masalah kesehatan masyarakat yang menonjol

terutama TB, HIV/AIDS, Rabies, ISPA, Diare. Penyakit Tidak Menular (PTM) di Kabupaten Humbang Hasundutan juga menjadi isu penting dimana pola hidup masyarakat yang tidak sehat mengakibatkan meningkatnya morbiditas, mortalitas, dan disabilitas di kalangan masyarakat yang diakibatkan oleh berbagai penyakit tidak menular seperti Hipertensi, Diabetes Mellitus, Stroke, Penyakit jantung dan yang terbaru adalah peningkatan kasus penyakit Kanker.

4. Sistem informasi menjadi lemah setelah desentralisasi, data dan informasi untuk *evidence planning* tidak tersedia tepat waktu. Sistem Informasi Kesehatan *online* yang berbasis fasilitas agar semakin ditingkatkan, dengan memperhatikan faktor yang mempengaruhi seperti ketersediaan jaringan, input dari *entry point* di daerah dan fasilitas kesehatan serta pemanfaatan informasi.
5. Kondisi sumber daya manusia kesehatan di Kabupaten Humbang Hasundutan saat ini masih jauh dari cukup, baik secara kuantitas maupun kualitas. Permasalahan besar tentang SDM kesehatan yang dirasakan adalah kurang efisien dan kurang efektif dalam menanggulangi permasalahan kesehatan, serta kemampuan dalam perencanaan pada umumnya masih lemah. Distribusi tenaga kesehatan kurang merata, hal ini mengakibatkan terjadinya ketimpangan antara ibukota kabupaten/kecamatan.
6. Permasalahan yang menghambat tercapainya target kinerja pelaksanaan program KB yaitu minimnya tenaga Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PLKB). PLKB merupakan ujung tombak penyuluhan KB yang berhubungan langsung dengan masyarakat dan atau sebagai penggerak masyarakat di desa/kelurahan binaannya agar mendapatkan akses dan kualitas pelayanan KB dan KS yang memadai.
7. Pembinaan kesertaan KB melalui penyuluhan dan pelayanan KB yang berkesinambungan sangat diperlukan dan tetap menjadi prioritas. Ini ditujukan untuk mengurangi cakupan pasangan usia subur yang ingin ber-KB tapi belum terpenuhi (unmet need) yang disebabkan karena letak atau kondisi wilayah yang sulit dijangkau dan kondisi sarana dan prasarana pelayanannya masih kurang (terbatas). Di samping itu, juga bertujuan untuk mencegah terjadinya drop out (DO) pada peserta KB tersebut sehingga pencapaian jumlah peserta KB tetap meningkat.

8. Masyarakat yang menganggap program KB masih tabu khususnya dalam kontrasepsi pria (MOP). Pandangan masyarakat secara adat yang menganggap banyak anak banyak rejeki yang sebenarnya tidak relevan lagi dengan situasi dan kondisi saat ini dimana biaya kebutuhan hidup yang semakin meningkat.

#### **2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD**

Review terhadap rancangan awal Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) dapat dilihat dengan membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan kebutuhan program dan kegiatan. Proses ini dilakukan untuk menjamin kesesuaian antara rancangan awal program dan kegiatan dengan kebutuhan program dan kegiatan.

Pada tahap awal proses penyusunan rencana kerja, Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana melakukan review terhadap rancangan awal RKPD 2025 karena harus memastikan bahwa RKPD memfasilitasi kebutuhan Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di tahun 2025. Berdasarkan Rancangan awal RKPD serta memperhatikan sasaran dan prioritas pembangunan, program dan kegiatan, indikator dan target kinerja, serta pagu indikatif Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, maka analisis kebutuhan Rencana Kerja Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dapat dilihat pada tabel T-C 31 di bawah ini:



TABEL T-C. 31

REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPd TAHUN 2024  
DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

RANCANGAN AWAL RKPd						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Catatan Penting	
<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN</b>				<b>175.409.052.700</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN</b>				<b>103.496.297.303</b>		
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH</b>	<i>Persentase kepuasan ASN terhadap dukungan manajemen perkantoran</i>	Dinas Kesehatan Pengendalian penduduk dan KB, RSUD	95%	82.078.339.300	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH</b>	<i>Persentase kepuasan ASN terhadap dukungan manajemen perkantoran</i>	Dinas Kesehatan Pengendalian penduduk dan KB, RSUD	95%	56.525.073.607		
<b>Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<i>Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja tepat waktu</i>	Dinas Kesehatan Pengendalian penduduk dan KB, RSUD	95%	93.720.000	<i>Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja tepat waktu</i>	Persentase Dokumen perencanaan yang sesuai renstra	Dinas Kesehatan Pengendalian penduduk dan KB, RSUD	95%	12.264.000		
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat daerah	Dinas Kesehatan Pengendalian penduduk dan KB, RSUD	2 Dokumen	20.620.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat daerah	Dinas Kesehatan Pengendalian penduduk dan KB, RSUD	7 dokumen	12.264.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dinas Kesehatan Pengendalian penduduk dan KB, RSUD	3 Dokumen	61.100.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dinas Kesehatan Pengendalian penduduk dan KB, RSUD	-	-	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dinas Kesehatan Pengendalian penduduk dan KB, RSUD	4 Dokumen	12.000.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dinas Kesehatan Pengendalian penduduk dan KB, RSUD	-	-	

	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Persentase pembayaran gaji dan tunjangan serta penyampaian laporan keuangan tepat waktu	Dinas Kesehatan Pengendalian penduduk dan KB, RSUD	95%	76.849.620.000	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Persentase pembayaran gaji dan tunjangan serta penyampaian laporan keuangan tepat waktu	Dinas Kesehatan Pengendalian penduduk dan KB, RSUD	95%	54.745.390.004	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Dinas Kesehatan Pengendalian penduduk dan KB, RSUD	648 Orang	76.845.293.700	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Dinas Kesehatan Pengendalian penduduk dan KB, RSUD	580 orang	54.745.390.004	
	Koordinasi dan penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semester SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKP dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	RSUD	16 Dokumen	4.326.300	Koordinasi dan penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semester SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKP dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dinas Kesehatan Pengendalian penduduk dan KB, RSUD	-	-	
	<b>Administrasi barang milik daerah</b>	Persentase ketepatan penyusunan laporan barang milik daerah	Dinas Kesehatan Pengendalian penduduk dan KB	95%	7.425.000	<b>Administrasi barang milik daerah</b>	Persentase ketepatan penyusunan laporan barang milik daerah	Dinas Kesehatan Pengendalian penduduk dan KB	95%	7.468.690	
	Rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Dinas Kesehatan Pengendalian penduduk dan KB	13 Laporan	7.425.000	Rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Dinas Kesehatan Pengendalian penduduk dan KB	13 laporan	7.468.690	
	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Persentase pemenuhan administrasi umum	Dinas Kesehatan Pengendalian penduduk dan KB, RSUD	95%	1.197.072.500	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Persentase pemenuhan administrasi umum	Dinas Kesehatan Pengendalian penduduk dan KB, RSUD	15 Paket	1.016.158.633	
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	RSUD	15 Paket	88.829.300	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Dinas Kesehatan Pengendalian penduduk dan KB, RSUD	15 Paket	72.807.060	
	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Dinas Kesehatan Pengendalian penduduk dan KB	55 Paket	86.100.000	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Dinas Kesehatan Pengendalian penduduk dan KB, RSUD	13 Paket	246.786.573	

	Penyediaan Bahan logistik kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Dinas Kesehatan Pengendalian penduduk dan KB, RSUD	4 Paket	289.470.200	Penyediaan Bahan logistik kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Dinas Kesehatan Pengendalian penduduk dan KB, RSUD	2 Paket	127.329.000	
	Penyediaan barang cetakan dan pengadaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengadaan yang Disediakan	Dinas Kesehatan Pengendalian penduduk dan KB	13 Paket	137.500.000	Penyediaan barang cetakan dan pengadaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengadaan yang Disediakan	Dinas Kesehatan Pengendalian penduduk dan KB	13 Paket	39.250.000	
	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dinas Kesehatan pengendalian penduduk dan KB, RSUD	1435 Laporan	595.173.000	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dinas Kesehatan pengendalian penduduk dan KB, RSUD	13 Laporan	529.986.000	
	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	Persentase Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dinas Kesehatan Pengendalian penduduk dan KB	95%	5.375.000	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian</b>	<b>Dinas Kesehatan Pengendalian penduduk dan KB</b>	<b>20 Orang</b>	-	
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	Dinas Kesehatan Pengendalian penduduk dan KB	20 Orang	5.375.000	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	Dinas Kesehatan Pengendalian penduduk dan KB	-	-	
	<b>Penyediaan Jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Persentase pemenuhan kebutuhan atas jasa, sarana dan prasarana kantor	Dinas Kesehatan Pengendalian penduduk dan KB	95%	2.793.911.800	<b>Penyediaan Jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase pemenuhan kebutuhan atas jasa, sarana dan prasarana kantor</b>	<b>Dinas Kesehatan Pengendalian penduduk dan KB</b>	<b>1 Laporan</b>	<b>344.627.280</b>	
	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dinas Kesehatan Pengendalian penduduk dan KB	1 Laporan	6.050.000	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dinas Kesehatan Pengendalian penduduk dan KB	-	-	
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Dinas Kesehatan Pengendalian penduduk dan KB, RSUD	6 Laporan	983.885.000	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Dinas Kesehatan Pengendalian penduduk dan KB, RSUD	13 Laporan	266.420.800	
	Penyediaan Jasa pelayanan umum kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Dinas Kesehatan Pengendalian penduduk dan KB, dan RSUD	2 laporan	1.803.976.800	Penyediaan Jasa pelayanan umum kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Dinas Kesehatan Pengendalian penduduk dan KB	14 laporan	78.206.480	

		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Persentase barang milik daerah yang dipelihara	Dinas Kesehatan Pengendalian penduduk dan KB, RSUD	95%	1.131.215.000	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase barang milik daerah yang dipelihara</b>	<b>Dinas Kesehatan Pengendalian penduduk dan KB</b>	<b>17 Unit</b>	<b>399.165.000</b>	
		Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Dinas Kesehatan Pengendalian penduduk dan KB, RSUD	17 Unit	798.575.000	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Dinas Kesehatan Pengendalian penduduk dan KB, RSUD	17 unit	300.000.000	
		Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Dinas Kesehatan Pengendalian penduduk dan KB, RSUD	104 Unit	231.880.000	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Dinas Kesehatan Pengendalian penduduk dan KB, RSUD	14 Unit	99.165.000	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	RSUD	1 unit	100.760.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Dinas Kesehatan Pengendalian penduduk dan KB, RSUD	-	-	
<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>			Persentase capaian SPM Kesehatan	<b>Dinas Kesehatan Pengendalian penduduk dan KB</b>	95%	<b>92.496.052.400</b>	<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>	Persentase capaian SPM Kesehatan	<b>Dinas Kesehatan Pengendalian penduduk dan KB</b>	95%	<b>45.443.060.296</b>	
		<b>Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota</b>	<b>Persentase puskesmas yang memiliki sarana dan prasarana sesuai standar</b>	Dinas Kesehatan Pengendalian penduduk dan KB	85%	<b>7.387.400.500</b>	<b>Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota</b>	<b>Persentase puskesmas yang memiliki sarana dan prasarana sesuai standar</b>	Dinas Kesehatan Pengendalian penduduk dan KB	85%	<b>7.001.096.992</b>	
							Rehabilitasi dan pemeliharaan fasilitas kesehatan lainnya	Jumlah sarana, prasarana dan alat kesehatan yang telah dilakukan rehabilitasi dan pemeliharaan oleh fasilitas kesehatan lainnya	Dinas Kesehatan Pengendalian penduduk dan KB	3 Unit	1.225.200.000	
		Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	Dinas Kesehatan Pengendalian penduduk dan KB, RSUD	3 Paket	2.197.500.000	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	Dinas Kesehatan Pengendalian penduduk dan KB	13 Unit	2.393.130.250	

		Pengadaan Obat, Vaksin	Jumlah Obat dan Vaksin yang Disediakan	Dinas Kesehatan Pengendalian penduduk dan KB, RSUD	2 Paket	2.467.500.000	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis habis pakai, Vaksin, makanan dan minuman di fasilitas kesehatan	Jumlah Obat dan Vaksin yang Disediakan	Dinas Kesehatan Pengendalian penduduk dan KB	10 Paket	3.089.120.376	
		Pengadaan Bahan Habis Pakai	Jumlah Bahan Habis Pakai yang Disediakan	Dinas Kesehatan Pengendalian penduduk dan KB, RSUD	2 Paket	2.220.000.500	Pengadaan Bahan Habis Pakai	Jumlah Bahan Habis Pakai yang Disediakan	Dinas Kesehatan Pengendalian penduduk dan KB	-	-	
		Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	Terpeliharanya alat medik selama 1 tahun	RSUD	DAU	88.000.000	Pemeliharaan rutin dan berkala alat kesehatan/alat penunjang Medik Fasilitas Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	Dinas Kesehatan Pengendalian penduduk dan KB	0	-	
		Pemeliharaan rutin dan berkala alat kesehatan/alat penunjang Medik Fasilitas Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	Dinas Kesehatan Pengendalian penduduk dan KB, RSUD	24 Unit	297.300.000	Pemeliharaan rutin dan berkala alat kesehatan/alat penunjang Medik Fasilitas Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	Dinas Kesehatan Pengendalian penduduk dan KB, RSUD	13 Unit	54.013.000	
							Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	Dinas Kesehatan Pengendalian penduduk dan KB	41000 Keluarga	35.108.000	
		Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman yang Didistribusikan ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Dinas Kesehatan Pengendalian penduduk dan KB	36 Kali	205.100.000	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman yang Didistribusikan ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Dinas Kesehatan Pengendalian penduduk dan KB	12 Paket	204.525.366	

Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Persentase pelayanan UKM dan UKP Rujukan	Dinas Kesehatan	84%	84.883.369.200	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelayanan UKM dan UKP Rujukan	Dinas Kesehatan	84%	37.446.065.904	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Dinas Kesehatan Pengendalian penduduk dan KB	3752 Orang	8.654.211.200	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Dinas Kesehatan Pengendalian penduduk dan KB	3752 Orang	595.864.000	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Dinas Kesehatan Pengendalian penduduk dan KB	3556 Orang	505.586.300	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Dinas Kesehatan Pengendalian penduduk dan KB	3556 orang	137.933.000	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Dinas Kesehatan pengendalian penduduk dan KB	3281 orang	50.000.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Dinas Kesehatan Pengendalian penduduk dan KB	-	-	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Dinas Kesehatan Pengendalian penduduk dan KB	15344 orang	508.233.700	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Dinas Kesehatan Pengendalian penduduk dan KB	15344 orang	138.872.800	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada anak Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Dinas Kesehatan pengendalian penduduk dan KB	29637 orang	292.735.300	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada anak Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Dinas Kesehatan Pengendalian penduduk dan KB	42356 orang	307.690.400	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Dinas Kesehatan Pengendalian penduduk dan KB	12849 orang	152.995.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Dinas Kesehatan Pengendalian penduduk dan KB	94040 orang	63.855.000	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Dinas Kesehatan Pengendalian penduduk dan KB	22914 orang	85.000.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Dinas Kesehatan Pengendalian penduduk dan KB	29160 orang	29.438.520	
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Mellitus	Jumlah Penderita Diabetes Mellitus yang Mendapatkan Sesuai Standar	Dinas Kesehatan Pengendalian penduduk dan KB	942 orang	240.328.100	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Dinas Kesehatan pengendalian penduduk dan KB	2216 orang	552.568.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Penderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Dinas Kesehatan Pengendalian penduduk dan KB	3445 orang	782.559.300	

		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan orang dengan resiko terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Dinas Kesehatan Pengendalian penduduk dan KB	1215 orang	100.276.500	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan orang dengan resiko terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Dinas Kesehatan Pengendalian penduduk dan KB	5779 orang	135.310.000	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dinas Kesehatan Pengendalian penduduk dan KB	12 Dokumen	2.828.975.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dinas Kesehatan Pengendalian penduduk dan KB	156 Dokumen	2.880.414.000	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)		Dinas Kesehatan Pengendalian penduduk dan KB		200.000.000						
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Dinas Kesehatan Pengendalian penduduk dan KB	192 Orang	194.500.000	Pengelolaan pelayanan kesehatan jiwa dan Napza	Jumlah penyalahguna jiwa dan Napza yang mendapat pelayanan kesehatan	Dinas Kesehatan Pengendalian penduduk dan KB	3000 Orang	121.994.400	
		Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Dinas Kesehatan Pengendalian penduduk dan KB	12 Dokumen	2.669.702.000	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Dinas Kesehatan Pengendalian penduduk dan KB	156 Dokumen	2.350.065.391	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Dinas Kesehatan Pengendalian penduduk dan KB, RSUD	12 Dokumen	293.537.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Dinas Kesehatan Pengendalian penduduk dan KB	156 Dokumen	628.678.500	
							Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Surveilans Kesehatan	Dinas Kesehatan Pengendalian penduduk dan KB	156 Dokumen	594.742.000	
		Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Dinas Kesehatan Pengendalian penduduk dan KB	12 Dokumen	190.247.200	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Dinas Kesehatan Pengendalian penduduk dan KB	156 Dokumen	314.664.700	
		Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan, RSUD	25000 Dokumen	64.257.905.000	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan Pengendalian penduduk dan KB	2 Dokumen	24.724.588.793	

		Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Dinas Kesehatan Pengendalian penduduk dan KB	12 Dokumen	Rp2.471.577.000	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Dinas Kesehatan Pengendalian penduduk dan KB	12 Dokumen	3.137.473.000	
							Pengambilan dan pengiriman spesimen penyakit potensi KLB ke laboratorium rujukan/nasional	Jumlah spesimen penyakit potensial KLB ke Laboratorium rujukan/nasional yang didistribusikan	Dinas Kesehatan Pengendalian penduduk dan KB	12 Paket	7.500.000	
		Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	Dinas Kesehatan Pengendalian penduduk dan KB, RSUD	12 Puskesmas	800.405.000	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Dinas Kesehatan Pengendalian penduduk dan KB	12 Laporan	71.900.000	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	Dinas Kesehatan Pengendalian penduduk dan KB, RSUD	46000 RT	74.915.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	Dinas Kesehatan Pengendalian penduduk dan KB	144 Dokumen	182.194.000	
		<b>Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi</b>	<b>Persentase Puskesmas yang menyampaikan laporan yang sesuai standar dan tepat waktu</b>	<b>Dinas Kesehatan Pengendalian penduduk dan KB, RSUD</b>	<b>94%</b>	<b>72.500.000</b>	<b>Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi</b>	<b>Persentase Puskesmas yang menyampaikan laporan yang sesuai standar dan tepat waktu</b>	<b>Dinas Kesehatan Pengendalian penduduk dan KB</b>	<b>94%</b>	<b>758.303.800</b>	
		Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Dinas Kesehatan Pengendalian penduduk dan KB, RSUD	37 Eksemplar	72.500.000	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Dinas Kesehatan Pengendalian penduduk dan KB	157 Dokumen	758.303.800	
		<b>Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D serta fasilitas pelayanan kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase Faskes yang terakreditasi</b>	<b>Dinas Kesehatan Pengendalian penduduk dan KB</b>	<b>100%</b>	<b>152.782.700</b>	<b>Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D serta fasilitas pelayanan kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase Faskes yang terakreditasi</b>	<b>Dinas Kesehatan Pengendalian penduduk dan KB</b>	<b>100%</b>	<b>237.593.600</b>	
		Peningkatan tata Kelola rumah sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat daerah kabupaten/kota	Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya	Dinas Kesehatan Pengendalian penduduk dan KB	30 Fasyankes	96.352.700	Peningkatan tata Kelola rumah sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat daerah kabupaten/kota	Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya	Dinas Kesehatan Pengendalian penduduk dan KB	-	-	

		Peningkatan mutu pelayanan fasilitas kesehatan	Jumlah Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar	Dinas Kesehatan Pengendalian penduduk dan KB	12 Puskesmas	56.430.000	Peningkatan mutu pelayanan fasilitas kesehatan	Jumlah Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar	Dinas Kesehatan Pengendalian penduduk dan KB	13 unit	237.593.600	
		Penyiapan perumusan dan pelaksanaan pelayanan kesehatan rujukan	Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Dinas Kesehatan Pengendalian penduduk dan KB	12 Dokumen		Penyiapan perumusan dan pelaksanaan pelayanan kesehatan rujukan	Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Dinas Kesehatan Pengendalian penduduk dan KB	-	-	
<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN</b>			Persentase SDM yang bermutu dan sesuai kompetensi	<b>Dinas Kesehatan Pengendalian penduduk dan KB</b>	53%	<b>764.530.000</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN</b>	Persentase SDM yang bermutu dan sesuai kompetensi	<b>Dinas Kesehatan Pengendalian penduduk dan KB</b>	53%	<b>1.255.710.800</b>	
		<b>Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM Manusia di Wilayah Kabupaten/Kota</b>	<i>Persentase Pemenuhan SDM dan Kompetensi sesuai standar</i>	<b>Dinas Kesehatan Pengendalian penduduk dan KB</b>	25%	<b>280.000.000</b>	<b>Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM Manusia di Wilayah Kabupaten/Kota</b>	<i>Persentase Pemenuhan SDM dan Kompetensi sesuai standar</i>	<b>Dinas Kesehatan Pengendalian penduduk dan KB</b>	25%	<b>329.695.800</b>	
		Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	Dinas Kesehatan Pengendalian penduduk dan KB	576	200.000.000	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	Dinas Kesehatan Pengendalian penduduk dan KB	-	-	
		Pembinaan dan pengawasan Sumber daya manusia kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Dinas kesehatan, pengendalian penduduk dan KB	12 Dokumen	80.000.000	Pembinaan dan pengawasan Sumber daya manusia kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Dinas kesehatan, pengendalian penduduk dan KB	12 Dokumen	329.695.800	
<b>Pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi teknis sumber daya manusia kesehatan tingkat daerah kabupaten/kota</b>			<i>Persentase SDM yang memiliki sertifikat kompetensi</i>	<b>Dinas Kesehatan Pengendalian penduduk dan KB, RSUD</b>	78 %	<b>484.530.000</b>	<b>Pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi teknis sumber daya manusia kesehatan tingkat daerah kabupaten/kota</b>	<i>Persentase SDM yang memiliki sertifikat kompetensi</i>	<b>Dinas Kesehatan Pengendalian penduduk dan KB, RSUD</b>	78%	<b>926.015.000</b>	

		Pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi teknis sumber daya manusia kesehatan tingkat daerah kabupaten/kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	Dinas Kesehatan Pengendalian penduduk dan KB, RSUD	20 orang	484.530.000	Pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi teknis sumber daya manusia kesehatan tingkat daerah kabupaten/kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupatn/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	Dinas Kesehatan Pengendalian penduduk dan KB	50 orang	926.015.000	
		Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar				6.494.400.000						
		<b>PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN</b>	Persentase sarana yang menyediakan sediaan makanan minuman yang sesuai standar	<b>Dinas kesehatan, pengendalian penduduk dan KB</b>	50%	<b>70.131.000</b>	<b>PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN</b>	Persentase sarana yang menyediakan sediaan makanan minuman yang sesuai standar	<b>Dinas kesehatan, pengendalian penduduk dan KB</b>	50%	<b>76.516.600</b>	
		<i>Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)</i>	<i>Persentase Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang memiliki Izin</i>	Dinas kesehatan, pengendalian penduduk dan KB	80%	<b>24.560.000</b>	<i>Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)</i>	<i>Persentase Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang memiliki Izin</i>	<b>Dinas kesehatan, pengendalian penduduk dan KB</b>	<b>80%</b>	<b>60.622.000</b>	
		<i>Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)</i>	<i>Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)</i>	Dinas kesehatan, pengendalian penduduk dan KB	20 Dokumen	24.560.000	<i>Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)</i>	<i>Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)</i>	Dinas kesehatan, pengendalian penduduk dan KB	12 Dokumen	60.622.000	
		<b>Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga</b>	<i>Persentase IRTP yang memiliki SP-PIRT</i>	<b>Dinas kesehatan, pengendalian penduduk dan KB</b>	25%	<b>27.500.000</b>	<b>Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga</b>	<i>Persentase IRTP yang memiliki SP-PIRT</i>	<b>Dinas kesehatan, pengendalian penduduk dan KB</b>			

		Pengendalian dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT Sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Dinas kesehatan, pengendalian penduduk dan KB	40 Dokumen	27.500.000	Pengendalian dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT Sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Dinas kesehatan, pengendalian penduduk dan KB	-	-
		<b>Penerbitan sertifikat laik higiene sanitasi tempat pengolahan makanan (TPM) antara lain jasa boga, Rumah Makan/Restoran, dan Depot Air Minum (DAM)</b>	<i>Persentase TPM yang memiliki sertifikat laik higiene sanitasi</i>	<b>Dinas kesehatan, pengendalian penduduk dan KB</b>	30%	18.071.000	<b>Penerbitan sertifikat laik higiene sanitasi tempat pengolahan makanan (TPM) antara lain jasa boga, Rumah Makan/Restoran, dan Depot Air Minum (DAM)</b>	<i>Persentase TPM yang memiliki sertifikat laik higiene sanitasi</i>	<b>Dinas kesehatan, pengendalian penduduk dan KB</b>	30%	15.894.600
		Pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan penerbitan sertifikat laik higiene sanitasi tempat pengolahan makanan (TPM) antara lain jasa boga, Rumah Makan/Restoran, dan Depot Air Minum (DAM)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Dinas kesehatan, pengendalian penduduk dan KB	30 Dokumen	18.071.000	Pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan penerbitan sertifikat laik higiene sanitasi tempat pengolahan makanan (TPM) antara lain jasa boga, Rumah Makan/Restoran, dan Depot Air Minum (DAM)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Dinas kesehatan, pengendalian penduduk dan KB	30 Dokumen	15.894.600
							<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN</b>	Persentase RT yang melaksanakan germas	-	44%	195.936.000

						<b>Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<i>Persentase UKBM aktif</i>		87 persen	<b>195.936.000</b>	
						Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Dinas kesehatan, pengendalian penduduk dan KB	144 Dokumen	195.936.000	
		<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA</b>			<b>6.000.290.000</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA</b>				<b>4.688.905.384</b>	
		<b>PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK</b>	<b>Persentase Mitra/Stakeholder yang melaksanakan kebijakan pengendalian penduduk</b>	Dinas Kesehatan Pengendalian penduduk dan KB	100%	873.000.000	<b>PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK</b>	<b>Persentase Mitra/Stakeholder yang melaksanakan kebijakan pengendalian penduduk</b>	Dinas Kesehatan Pengendalian penduduk dan KB	100%	<b>441.465.000</b>
	<b>Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Dalam Rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk</b>	<b>Persentase Sektor Pendukung Kebijakan Pengendalian Penduduk</b>	Dinas Kesehatan Pengendalian penduduk dan KB	100%	455.000.000	<b>Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Dalam Rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk</b>	<b>Persentase Sektor Pendukung Kebijakan Pengendalian Penduduk</b>	Dinas Kesehatan Pengendalian penduduk dan KB	100%	<b>187.755.000</b>	
	Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota terhadap Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (Program KKBPK)	Jumlah pertemuan lintas sektor di tingkat Kabupaten	Dinas Kesehatan Pengendalian penduduk dan KB	2 Media	400.000.000	Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota terhadap Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (Program KKBPK)	Jumlah pertemuan lintas sektor di tingkat Kabupaten	Dinas Kesehatan Pengendalian penduduk dan KB	12 Dokumen	123.515.000	
	Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal	Jumlah Sekolah Siaga Kependudukan Yang terbentuk	Dinas Kesehatan Pengendalian penduduk dan KB	15 Sekolah	55.000.000	Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal	Jumlah Sekolah Siaga Kependudukan Yang terbentuk	Dinas Kesehatan Pengendalian penduduk dan KB	15 Kegiatan	64.240.000	

Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota		Persentase Data Mikro Keluarga	Dinas Kesehatan Pengendalian penduduk dan KB	100%	418.000.000	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Data Mikro Keluarga	Dinas Kesehatan Pengendalian penduduk dan KB	100%	253.710.000	
	Membentuk Rumah Data Kependudukan Di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program KKBPK di Sektor Lain	Jumlah Rumah Data yang difasilitasi	Dinas Kesehatan Pengendalian penduduk dan KB	1 Rumah Data	93.000.000	Membentuk Rumah Data Kependudukan Di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program KKBPK di Sektor Lain	Jumlah Rumah Data yang difasilitasi	Dinas Kesehatan Pengendalian penduduk dan KB	-	-	
	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Jumlah PLKB,PPKBD dan Sub PPKBD Pelaksana Sistem Informasi Keluarga	Dinas Kesehatan Pengendalian penduduk dan KB	337 Orang	85.000.000	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Jumlah PLKB,PPKBD dan Sub PPKBD Pelaksana Sistem Informasi Keluarga	Dinas Kesehatan Pengendalian penduduk dan KB	12 Laporan	253.710.000	
	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga		Dinas Kesehatan Pengendalian penduduk dan KB	154 Desa	165.000.000						
	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB		Dinas Kesehatan Pengendalian penduduk dan KB	10 Balai	75.000.000						
<b>PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)</b>		<b>Persentase Akseptor KB</b>	<b>Dinas Kesehatan Pengendalian penduduk dan KB</b>	<b>80 %</b>	<b>3.598.090.000</b>	<b>PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)</b>	<b>Persentase Akseptor KB</b>	<b>Dinas Kesehatan Pengendalian penduduk dan KB</b>	<b>80%</b>	<b>4.247.440.384</b>	
	<b>Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal</b>	<b>Persentase Masyarakat Yang terinformasi advokasi/KIE</b>	<b>Dinas Kesehatan Pengendalian penduduk dan KB</b>	<b>75%</b>	<b>1.083.000.000</b>	<b>Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal</b>	<b>Persentase Masyarakat Yang terinformasi advokasi/KIE</b>	<b>Dinas Kesehatan Pengendalian penduduk dan KB</b>	<b>75%</b>	<b>3.947.448.384</b>	

-	Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah Mitra Kerja	Dinas Kesehatan Pengendalian penduduk dan KB	16 Mitra Kerja	135.000.000	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Jumlah Pertemuan Mekanisme Operasional Program KKBPK	Dinas Kesehatan Pengendalian penduduk dan KB	12 Laporan	3.947.448.384	
-	<b>Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang</b>	<b>Jumlah Media Kie</b>	<b>Dinas Kesehatan Pengendalian penduduk dan KB</b>	<b>25 Jenis</b>	<b>180.000.000</b>	<b>Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/ Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)</b>	<b>Persentase Penyuluh Yang Berperan Aktif</b>	<b>Dinas Kesehatan Pengendalian penduduk dan KB</b>	<b>100%</b>	-	
-	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Jumlah Pertemuan Mekanisme Operasional Program KKBPK	Dinas Kesehatan Pengendalian penduduk dan KB	2 Kegiatan	145.000.000	Pembinaan IMP dan Program KKBPK di lini lapangan oleh PKB/PLKB	Jumlah PLKB,PPKBD dan Sub PPKBD Peserta Jambore	Dinas Kesehatan Pengendalian penduduk dan KB	-	-	
	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK		Dinas Kesehatan Pengendalian penduduk dan KB	10 Kecamatan	525.000.000	Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Jumlah laporan hasil penguatan Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Dinas Kesehatan Pengendalian penduduk dan KB	-	-	
	Pengendalian Program KKBPK		Dinas Kesehatan Pengendalian penduduk dan KB	154 Desa	98.000.000						
	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/ Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Persentase Penyuluh Yang Berperan Aktif	Dinas Kesehatan Pengendalian penduduk dan KB	100%	818.040.000						
	Pembinaan IMP dan Program KKBPK di lini lapangan oleh PKB/PLKB	Jumlah PLKB,PPKBD dan Sub PPKBD Peserta Jambore	Dinas Kesehatan Pengendalian penduduk dan KB	92 Kader	385.000.000						

	Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Jumlah Operasional PKB/PLKB	Dinas Kesehatan Pengendalian penduduk dan KB	20 Petugas Lapangan	95.040.000						
	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)		Dinas Kesehatan Pengendalian penduduk dan KB	92 Kader	338.000.000						
	<b>Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi Serta Pelaksanaan Pelayanan KB Di Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase Sarana dan Prasarana Yang Tersedia</b>	<b>Dinas Kesehatan Pengendalian penduduk dan KB</b>	<b>100%</b>	<b>965.000.000</b>	<b>Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi Serta Pelaksanaan Pelayanan KB Di Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase Sarana dan Prasarana Yang Tersedia</b>	<b>Dinas Kesehatan Pengendalian penduduk dan KB</b>	<b>100%</b>	<b>299.992.000</b>	
	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya		Dinas Kesehatan Pengendalian penduduk dan KB	21 Fasyankes%	50.000.000	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Dinas Kesehatan Pengendalian penduduk dan KB	-	-	
	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Dinas Kesehatan Pengendalian penduduk dan KB	1280 Akseptor	700.000.000	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Sarana dan Prasarana Klinik Pelayanan KB	Dinas Kesehatan Pengendalian penduduk dan KB	5 Unit	299.992.000	
	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Sarana dan Prasarana Klinik Pelayanan KB	Dinas Kesehatan Pengendalian penduduk dan KB	2 Jenis	200.000.000						

	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya		Dinas Kesehatan Pengendalian penduduk dan KB		15.000.000						
	<b>Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber- KB</b>		Dinas Kesehatan Pengendalian penduduk dan KB	77,93	732.050.000						
	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB		Dinas Kesehatan Pengendalian penduduk dan KB	140 Kampung KB	510.400.000						
	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB		Dinas Kesehatan Pengendalian penduduk dan KB	140 Kampung KB	221.650.000						
	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)</b>	<b>Persentase keluarga yang mendapatkan pembinaan di tiap POKTAN</b>	<b>Dinas Kesehatan Pengendalian penduduk dan KB</b>	<b>44%</b>	<b>1.529.200.000</b>						
	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Persentase keluarga yang aktif dalam ketahanan keluarga	Dinas Kesehatan Pengendalian penduduk dan KB	32%	1.529.200.000						
	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UppKS)	Jumlah Pembinaan Kelompok Ketahanan Keluarga	Dinas Kesehatan Pengendalian penduduk dan KB	100 kelompok	400.000.000						
	Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan dan kesejahteraan keluarga (BKB, BKR, BKL, PIKR dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/ UppKS)	Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UppKS)	Dinas Kesehatan Pengendalian penduduk dan KB	570 orang	1.129.200.000						
<b>TOTAL</b>					<b>181.409.342.700</b>	<b>TOTAL</b>					<b>108.185.202.687</b>

## **2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat**

Program/kegiatan usulan pemangku kepentingan sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 merupakan suatu hasil kajian yang diusulkan pemangku kepentingan sebagai bagian dari pendekatan perencanaan menggunakan sistem perencanaan bawah atas (*bottom-up planning*) berdasarkan asas demokratisasi dan desentralisasi, baik dari kelompok masyarakat, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah Kabupaten/Kota maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah Provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan Musrenbang kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah. Untuk selanjutnya dilakukan penelaahan kesesuaian usulan dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah dan mengakomodasi usulan yang sesuai dengan program/kegiatan dalam Renja Perangkat Daerah.

Telaah terhadap usulan program dan kegiatan masyarakat pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana telah dirangkum mulai dari musrenbang desa, musrenbang kecamatan, musrenbang kabupaten dan usulan pokok-pokok pikiran anggota DPRD tahun 2024. Pada proses pengusulan program dan kegiatan untuk RKPD tahun 2025, dilakukan Validasi usulan secara elektronik, guna memverifikasi dan validasi usulan program dan kegiatan dari pemangku kepentingan, perangkat daerah Kabupaten/Kota dan masyarakat. Validasi dilakukan bersama antara dan Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana terhadap usulan pemangku kepentingan dan perangkat daerah Kabupaten yang diinput dalam aplikasi Sistem Informasi Perangkat Daerah (SIPD). Usulan program dan kegiatan dari Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana pada dasarnya sudah sesuai dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagian besar usulan tersebut telah terakomodir dalam usulan Program dan Kegiatan yang dirumuskan oleh Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Usulan tersebut dapat dilihat pada tabel T-C.32 dibawah ini:

**TABEL T-C. 32**  
**USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PARA PEMANGKU KEPENTINGAN TAHUN 2025**  
**DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**

PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	BESARAN/VOLUME	CATATAN PENTING
<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>		<i>Persentase Capaian SPM Kesehatan</i>	27.117.719.043	
<b>Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota</b>	Dinas Kesehatan Pengendalian penduduk dan KB	<b>Persentase puskesmas yang memiliki sarana dan prasarana sesuai standar</b>	2.393.130.250	
Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Desa Pakkat Huagong, Desa Purba Baringin, Desa Sosortolong, Nagasaribu IV, Pusuk I, Pulo Godang, parmonangan, Marbun Toruan, Sionom Hudok dan aek nauli Pollung	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	2.393.130.250	Usulan Musreimbang
<b>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>		<b>Persentase pelayanan UKM dan UKP Rujukan</b>	24.724.588.793	
Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Desa Banuarea, Desa Aeknauli, Desa Hutapaung Utara	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	24.724.588.793	Usulan Musreimbang, Pokir DPRD
<b>TOTAL</b>			<b>27.117.719.043</b>	

## **BAB III**

### **TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN**

#### **3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Kebijakan Pemerintah Daerah Propinsi Sumatera Utara**

Pada saat ini Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana melaksanakan 2 (dua) urusan yaitu urusan pemerintahan bidang kesehatan dan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana. Dalam bidang kesehatan secara nasional, indikator kinerja didasarkan pada pencapaian SPM. Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga Negara secara minimal, terutama yang berkaitan dengan pelayanan dasar sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan.

Sedangkan dalam bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, program KB Nasional merupakan salah satu program sosial dasar yang tetap mendapat perhatian dan komitmen dari Pemerintah. Dalam RPJMN disebutkan bahwa program KB Nasional yang merupakan rangkaian pembangunan kependudukan dan keluarga kecil berkualitas sebagai langkah penting dalam mencapai pembangunan berkelanjutan. Hal ini sejalan dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota bahwa program KB menjadi salah satu urusan wajib bagi daerah.

Arah kebijakan Program KB Nasional antara lain :

1. Peningkatan akses dan kualitas pelayanan KB yang merata melalui :
  - a. Pembinaan peserta KB dengan penyediaan alokon terutama PUS
  - b. Penurunan disparitas akses dan kualitas pelayanan KB
  - c. Peningkatan peserta KB pria
  - d. Penurunan DO termasuk kegagalan dan komplikasi
  - e. Penguatan advokasi dan KIE KB bagi PUS dan remaja

- f. Penguatan kelembagaan KB
- g. Penguatan klinik KB pemerintah dan swasta dengan penyediaan sarana dan prasarana
- h. Peningkatan kapasitas tenaga lini lapangan KB dan tenaga medis KB, serta IMP/Kader KB
- i. Pembinaan ketahanan keluarga melalui BKB, BKR, dan pemberdayaan ekonomi keluarga dalam rangka meningkatkan dan mempertahankan kesertaan ber-KB serta meningkatkan KB mandiri.

1) Penyerasian kebijakan kependudukan dan KB

- a. Identifikasi peraturan perundangan dan kebijakan sektor yang terkait dengan program kependudukan dan KB
- b. Perumusan kebijakan kependudukan yang sinergis dan harmonis antara aspek kuantitas, kualitas, dan mobilitas dengan menyusun rancangan induk kependudukan baik nasional maupun regional/daerah
- c. Penyediaan sasaran parameter kependudukan yang disepakati semua sektor terkait
- d. Analisis dampak kependudukan
- e. Peningkatan kerjasama kependudukan dalam pendidikan

2) Peningkatan ketersediaan dan kualitas data dan informasi kependudukan yang memadai, akurat, dan tepat waktu

- a. Penyediaan data kependudukan yang bersumber dari sensus penduduk dan survei kependudukan serta data sektoral bidang KKB
- b. Peningkatan cakupan registrasi vital administrasi kependudukan.

Telaah terhadap kebijakan nasional merupakan penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

### **3.1.1. Struktur Organisasi**

Sesuai dengan Peraturan Bupati Humbang Hasundutan Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Humbang Hasundutan, Struktur

organisasi Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah sebagai berikut :



### 3.1.2 Susunan Kepegawaian

- I. Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
- II. Sekretaris
  1. Kepala Sub Bagian Program dan Informasi Kesehatan
  2. Kepala Sub Bagian Keuangan, Kepegawaian dan Umum
- III. Bidang Pelayanan dan Kesehatan Masyarakat
  1. Kelompok Jabatan Fungsional
- IV. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
  1. Kelompok Jabatan Fungsional
- V. Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
  1. Kelompok Jabatan Fungsional
- VI. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) : Rumah Sakit
- VII. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) : Puskesmas

### **3.1.3 Tugas Pokok dan Fungsi**

Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian kewenangan daerah meliputi perumusan kebijakan teknis, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian di bidang Kesehatan dan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang tertulis di atas, Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai fungsi seperti tersebut di bawah ini.

#### **A. Kepala Dinas**

Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan kewenangan desentralisasi di bidang kesehatan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana dan tugas lain yang diberikan Bupati.

Uraian Tugas Pokok :

- a. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas;
- b. perumusan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan di bidang kesehatan, masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, kefarmasian, alat kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) serta sumber daya kesehatan;
- c. perumusan kebijakan teknis bidang pengendalian kuantitas penduduk, keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- d. pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria dibidang pengendalian kuantitas penduduk, keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- e. pelaksanaan pepaduan dan sinkronisasi kebijakan pengendalian kuantitas penduduk;
- f. pelaksanaan pemetaan perkiraan pengendalian penduduk;
- g. pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi pengendalian kuantitas penduduk dan keluarga berencana;
- h. pelaksanaan pendayagunaan tenaga penyuluh keluarga berencana/petugas lapangan keluarga berencana dan kader keluarga berencana;

- i. pelaksanaan pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi;
- j. pelaksanaan pelayanan keluarga berencana;
- k. pelaksanaan pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan dalam pelaksanaan pelayanan, pembinaan kesertaan berkeluarga berencana, pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- l. mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi sekretariat, bidang dan kelompok jabatan fungsional;
- m. mengembangkan dan melaksanakan koordinasi, kerjasama dan kemitraan dengan Perangkat Daerah, instansi pemerintah, swasta dan/atau pihak ketiga lainnya dalam rangka memperlancar pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas;
- n. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati; dan
- o. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas.

## **B. Sekretariat**

Sekretariat merupakan unit kerja Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagai unsur staf dalam pelaksanaan administrasi dinas yang dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas;

Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan bahan Renstra, Renja, RKA dan DPA sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. pelaksanaan DPA;
- c. pengoordinasian penyusunan kebijakan, rencana strategis, program, kegiatan, dan anggaran serta tugas pembantuan di bidang kesehatan;
- d. pengelolaan kepegawaian Dinas;
- e. pengelolaan data dan informasi di bidang kesehatan;
- f. pengoordinasian dan pelaksanaan kerjasama di bidang kesehatan;

- g. pelaksanaan dokumen pelaksanaan anggaran Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
- h. pengoordinasian penyusunan laporan keuangan di bidang kesehatan;
- i. penyelenggaraan ketatausahaan, rumah tangga, bahan rancangan peraturan perundang-undangan di bidang Kesehatan, serta hubungan masyarakat;
- j. pengelolaan keuangan Dinas;
- k. pengoordinasian pelaksanaan tindak lanjut atas laporan hasil pemeriksaan;
- l. pengelolaan perlengkapan Dinas diluar prasarana dan sarana kesehatan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- m. pengoordinasian penyusunan laporan aset Dinas;
- n. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala Dinas; dan
- o. pelaporan dan pertanggungjawaban tugas dan fungsi sekretariat.

#### **b.1 Subbagian Program dan Informasi Kesehatan**

Subbagian Program dan Informasi Kesehatan merupakan satuan pelaksana sekretariat dalam pelaksanaan perencanaan, penyusunan laporan, penyajian data informasi serta monitoring, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Dinas. Kepala Subbagian Program dan Informasi Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, penyusunan laporan, penyajian data informasi serta monitoring, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Kepala Sub Bagian Program dan Informasi Kesehatan melaksanakan rincian tugas sebagai berikut :

- a. menyusun bahan Renstra, Renja, RKA, dan DPA Dinas sesuai lingkup tugasnya;
- b. melaksanakan DPA Dinas sesuai lingkup tugasnya;
- c. menghimpun bahan penyusunan Renstra, Renja, RKA, DPA Dinas;
- d. menyusun Renstra, Renja, RKA, DPA Dinas;
- e. menghimpun bahan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Dinas;

- f. menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Dinas;
- g. melaksanakan monitoring, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan DPA, tugas dan fungsi Dinas;
- h. menyusun kebijakan urgensi data informasi kesehatan dalam rangka pembangunan kesehatan;
- i. mengumpulkan, mengolah, menyediakan dan menyajikan data informasi kesehatan;
- j. membangun dan mengembangkan sistem informasi kesehatan Daerah;
- k. menyusun petunjuk teknis penyelenggaraan informasi kesehatan;
- l. menyelenggarakan sosialisasi, evaluasi dan pengendalian atas penerapan standar sesuai ketentuan yang ditetapkan;
- m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris Dinas; dan
- n. melaporkan dan mempertanggungjawabkan tugas dan fungsi subbagian program dan informasi kesehatan.

## **b.2. Subbagian Keuangan, Kepegawaian dan Umum**

Subbagian Keuangan, Kepegawaian dan Umum merupakan satuan pelaksana sekretariat dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan, kepegawaian, ketatausahaan, perlengkapan, kerumahtanggaan, arsip, dan dokumentasi Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Dinas. Kepala Subbagian Keuangan, Kepegawaian dan Umum mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan keuangan, kepegawaian, ketatausahaan, rumah tangga, perlengkapan, arsip, dan dokumentasi Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Kepala Sub Bagian Keuangan, Kepegawaian dan Umum melaksanakan rincian tugas sebagai berikut:

- o menyusun anggaran kas Dinas sesuai lingkup tugasnya;
- o memproses pengajuan Surat Penyajian Dana (SPD) dan Surat Perintah Membayar (SPM) Dinas;

- mempersiapkan pengajuan surat permohonan membayar, surat permohonan penyediaan dana, dan surat pencairan dana Dinas;
- menghimpun bahan penyusunan laporan keuangan Dinas;
- mengoordinasikan pelaksanaan tugas bendahara Dinas;
- melakukan administrasi keuangan Dinas;
- melakukan penyiapan pertanggungjawaban dan pengelolaan dokumen keuangan Dinas;
- melakukan urusan akuntansi, dan verifikasi keuangan Dinas;
- melakukan urusan perbendaharaan, pengelolaan penerimaan negara bukan pajak, pengujian dan penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM) Dinas;
- melakukan urusan gaji pegawai Dinas;
- melakukan penyiapan bahan pemantauan tidak lanjut laporan hasil pengawasan dan penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan ganti rugi Dinas;
- melakukan penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU) dan Rencana Pemeliharaan Barang Unit (RPBU) Dinas;
- melakukan penyiapan bahan penatausahaan dan inventarisasi barang Dinas;
- melakukan penyiapan bahan administrasi pengadaan, penyaluran, penghapusan dan pemindahtanganan barang milik Daerah Dinas;
- melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan;
- melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas;
- melaksanakan urusan kepegawaian, tata usaha, rumah tangga, kerja sama, kehumasan dan protokol serta ketatalaksanaan di Dinas;
- melaksanakan pembukuan, pendistribusian, pengendalian dan pengarsipan surat masuk Dinas;
- melaksanakan penerimaan, taklik, proses penandatanganan, penomoran, pencatatan, pembukuan, distribusi, pengiriman dan pengarsipan surat keluar Dinas;
- melaksanakan pemeliharaan keindahan, kebersihan, ketertiban, keteraturan, keamanan, kenyamanan Dinas;
- melaksanakan evaluasi kelembagaan dan ketatalaksanaan Dinas;
- melaksanakan urusan kerja sama, kehumasan dan protokol Dinas;
- menghimpun bahan, menyusun dan mengajukan kebutuhan perlengkapan dan peralatan kerja Dinas;
- memproses penyediaan perlengkapan dan peralatan kerja Dinas;

- melaksanakan penerimaan, penyimpanan, pendistribusian, pencatatan, pembukuan dan pelaporan perlengkapan dan peralatan Dinas;
- memproses penghapusan perlengkapan dan peralatan Dinas;
- menghimpun bahan, menyusun dan mengajukan kebutuhan ASN Dinas;
- melakukan urusan tata usaha kepegawaian, disiplin pegawai dan evaluasi kinerja pegawai Dinas;
- melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris Dinas; dan
- melaporkan dan mempertanggungjawabkan tugas dan fungsi subbagian keuangan, kepegawaian dan umum.

### **C. Kepala Bidang Pelayanan dan Kesehatan Masyarakat**

Bidang Kesehatan Masyarakat merupakan unit kerja Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagai unsur lini dalam pelaksanaan bidang kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan kesehatan, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga yang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Bidang pelayanan dan Kesehatan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang Kesehatan Masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan bahan Renstra, Renja, RKA, dan DPA Dinas sesuai lingkup tugasnya;
- b. pelaksanaan DPA Dinas sesuai lingkup tugasnya;
- c. penyiapan bahan perumusan kebijakan operasional di bidang kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga;
- d. pelaksanaan, pembinaan dan pengembangan kesehatan keluarga dan gizi;

- e. pelaksanaan, pembinaan dan pengembangan promosi dan pemberdayaan kesehatan;
- f. pelaksanaan, pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pengembangan kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga;
- g. pelaksanaan pembinaan tugas dan fungsi puskesmas;
- h. pemantauan evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga;
- i. pembinaan dan pengembangan kesehatan keluarga, gizi masyarakat promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan kerja dan olahraga;
- c. penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang pelayanan kesehatan dan sumber daya kesehatan;
- d. pelaksanaan kegiatan pelayanan kesehatan;
- e. pelaksanaan kegiatan kefarmasian dan prasarana dan sarana kesehatan;
- f. pelaksanaan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) kesehatan dan penyelenggaraan perizinan di bidang kesehatan;
- g. pelaksanaan pembinaan administrasi dan teknis terhadap Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas;
- h. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan teknis terhadap sarana kesehatan swasta;
- i. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelayanan kesehatan, kefarmasian dan prasarana sarana serta Sumber Daya Manusia (SDM) kesehatan dan perizinan;
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
- k. pelaporan dan pertanggungjawaban tugas dan fungsi bidang pelayanan dan kesehatan

#### **D. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit**

Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit merupakan unit kerja Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagai unsur lini dalam pelaksanaan bidang surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pengendalian tidak menular dan kesehatan jiwa yang dipimpin

oleh Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas; Kepala Pencegahan dan Pengendalian Penyakit mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit.

Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan bahan Renstra, Renja, RKA, dan DPA Dinas sesuai lingkup tugasnya;
- b. pelaksanaan DPA Dinas sesuai lingkup tugasnya;
- c. penyiapan bahan perumusan kebijakan operasional di bidang surveilans dan imunisasi;
- d. penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang surveilans dan imunisasi;
- e. pencegahan dan pengendalian penyakit menular dan pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular serta kesehatan jiwa;
- f. pelaksanaan kegiatan surveilans dan imunisasi;
- g. pelaksanaan kegiatan pencegahan dan pengendalian penyakit menular;
- h. pelaksanaan kegiatan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa;
- i. pemantauan evaluasi dan pelaporan di bidang surveilans dan imunisasi;
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
- k. pelaporan dan pertanggungjawaban tugas dan fungsi bidang pencegahan dan pengendalian penyakit.

#### **E. Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**

Bidang pengendalian penduduk, dan keluarga berencana merupakan unit kerja Dinas, sebagai unsur dalam pelaksanaan pembinaan pengendalian penduduk, Advokasi, Informasi Penyuluhan dan penggerakan, Pemberdayaan PLKB serta pembinaan keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga yang dipimpin oleh kepala bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab

kepada kepala Dinas. Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan pembinaan pengendalian penduduk, Advokasi, Informasi Penyuluhan dan penggerakan, Pemberdayaan PLKB serta pembinaan keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan bahan Renstra, Renja, RKA dan DPA Dinas sesuai lingkup tugasnya;
- b. pelaksanaan DPA Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis Daerah di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- d. pelaksanaan norma, standar, prosedur, kriteria pengendalian penduduk, advokasi, informasi penyuluhan dan penggerakan, Pemberdayaan PLKB serta pembinaan keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- e. pelaksanaan standart pelayanan minimal keluarga berencana;
- f. pelaksanaan pepaduan dan sinkronisasi kebijakan pemerintah Daerah dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk;
- g. pelaksanaan pemetaan perkiraan (parameter) pengendalian penduduk;
- h. pelaksanaan pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- i. pelaksanaan pendayagunaan tenaga PLKB;
- j. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang pengendalian penduduk, advokasi, informasi penyuluhan dan penggerakan, pemberdayaan PLKB serta pembinaan keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- k. pelaksanaan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data tentang informasi keluarga dan kesertaan berkeluarga berencana;
- l. pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- m. pelaksanaan koordinasi dalam pelaksanaan tugasnya.
- n. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya; dan
- o. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana.

## **F. Unit Pelaksana Teknis**

Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai Unit pelaksana teknis kesehatan masyarakat dan pelayanan kesehatan sebagai berikut:

- a. Rumah Sakit Umum Daerah
- b. Puskesmas

## **G. Kelompok Jabatan Fungsional**

Pada masing-masing unit kerja Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, pengendalian penduduk dan keluarga berencana dapat dibentuk kelompok jabatan fungsional yang mempunyai tugas melaksanakan kegiatan sesuai bidang tenaga fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kelompok jabatan fungsional terdiri atas sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya. Kelompok jabatan fungsional dipimpin oleh subkoordinator sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi jabatan administrator masing-masing. Subkoordinator melaksanakan tugas koordinasi penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan pada satu kelompok substansi pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi. Pengangkatan dan pembagian tugas subkoordinator ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

### **3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah**

Tujuan merupakan hasil akhir yang ingin dicapai oleh individu atau kelompok dalam melaksanakan suatu kegiatan atau pekerjaan. Tujuan digunakan sebagai pedoman dalam pencapaian program dan aktivitas serta memungkinkan untuk terukurnya efektivitas dan efisiensi kelompok atau organisasi.

Tujuan Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Humbang Hasundutan adalah ***Meningkatnya Status Kesehatan Masyarakat Humbang Hasundutan,***

dengan indikator **Usia Harapan Hidup**. Untuk mencapai tujuan tersebut Dinas Kesehatan menetapkan sasaran strategis diantaranya adalah:

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran pada tahun				
				2021	2022	2023	2024	2025
1	Meningkatnya Status kesehatan masyarakat kabupaten Humbang Hasundutan		Usia harapan Hidup	69,51	70,02	70,52	71	71,50
		Menurunnya angka kematian	CDR	3,12	3,11	3,10	3,09	3,08
		Meningkatnya status Gizi Masyarakat	Prevalensi Balita Stunting	14	14	14	13,5	11,5
		Menurunnya angka Kelahiran	TFR	2,60	2,56	2,53	2,50	2,47
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai evaluasi dari APIP	A	A	A	A	A

### 3.3. Program dan Kegiatan

#### 3.3.1 Faktor-faktor yang menjadi Bahan Pertimbangan terhadap Rumusan

##### Program dan Kegiatan

Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan penyusunan rumusan program dan kegiatan Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Humbang Hasundutan tahun 2023 yaitu:

- a. Sesuai dengan Visi dan Misi Bupati Humbang Hasundutan, Dinas Kesehatan, pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mendukung pencapaian misi I yaitu mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas melalui peningkatan mutu layanan pendidikan dan kesehatan. Dengan arah kebijakan dan prioritas pembangunan kabupaten Humbang Hasundutan tahun 2024 yang ditetapkan dalam peraturan daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang RPJMD Kabupaten Humbang Hasundutan tahun 2021-2026 yaitu penguatan pembangunan sumber daya manusia, peningkatan sector pertanian dan ekonomi kreatif yang didukung oleh infrastuktur untuk kesejahteraan masyarakat.
- b. Mendukung pencapaian target SDGs maka program yang dipilih disesuaikan dengan RPJMN Bidang Kesehatan yakni mengampu SDGs sebanyak 4 Goals yaitu:

1. Goal 2 Mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan meningkatkan gizi, serta mendorong pertanian yang berkelanjutan ( Gizi Masyarakat)
  2. Goal 3 Menjamin kehidupan yang sehat dan mendorong kesejahteraan bagi semua orang di segala usia ( Sistem Kesehatan Nasional)
  3. Goal 5 menjamin kesetaraan gender serta memberdayakan seluruh wanita dan perempuan ( Akses Kespro dan KB)
  4. Goal 6 Menjamin Ketersediaan dan pengelolaan air serta sanitasi yang berkelanjutan bagi semua orang ( Sanitasi dan Air Bersih)
- c. Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan juga menjadi salah satu pertimbangan. Program dan kegiatan yang dirumuskan oleh Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Humbang Hasundutan harus mendongkrak capaian indikator SPM terhadap target yang telah ditetapkan.
- d. Dalam mendukung program Penanggulangan Kemiskinan Tingkat di Kabupaten Humbang Hasundutan, Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana melalui program jaminan pembiayaan dan pemeliharaan kesehatan telah menjamin penduduk miskin di Kabupaten Humbang Hasundutan mendapatkan pelayanan kesehatan secara gratis;
- e. Meningkatkan jejaring kerjasama dengan lintas program dan lintas sektor dan menjalin kemitraan dengan masyarakat dan kalangan swasta

Berdasarkan faktor-faktor yang menjadi pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, dalam Rencana Kerja Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2025 dirumuskan bahwa untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana merumuskan 7 (Tujuh) program, (Sembilan belas) kegiatan dan 50 (lima puluh) sub kegiatan. Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana memuat Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2025 yang mengacu pada Kepmendagri nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur

Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Secara rinci Program dan Kegiatan Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2025 sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi
<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN</b>		
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH</b>	<i>Indeks kepuasan ASN terhadap dukungan manajemen perkantoran</i>	Dinas Kesehatan Pengendalian penduduk dan KB
<b>Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	Persentase Dokumen perencanaan yang sesuai renstra	Dinas Kesehatan Pengendalian penduduk dan KB
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat daerah	Dinas Kesehatan Pengendalian penduduk dan KB
<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Persentase pembayaran gaji dan tunjangan serta penyampaian laporan keuangan tepat waktu	Dinas Kesehatan Pengendalian penduduk dan KB, RSUD
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Dinas Kesehatan Pengendalian penduduk dan KB
<b>Administrasi barang milik daerah</b>	Persentase ketepatan penyusunan laporan barang milik daerah	Dinas Kesehatan Pengendalian penduduk dan KB
Rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Dinas Kesehatan Pengendalian penduduk dan KB
<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Persentase pemenuhan administrasi umum	Dinas Kesehatan Pengendalian penduduk dan KB, RSUD
Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Dinas Kesehatan Pengendalian penduduk dan KB
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Dinas Kesehatan Pengendalian penduduk dan KB
Penyediaan Bahan logistik kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Dinas Kesehatan Pengendalian penduduk dan KB
Penyediaan barang cetakan dan pengadaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Dinas Kesehatan Pengendalian penduduk dan KB
Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dinas Kesehatan Pengendalian penduduk dan KB
<b>Penyediaan Jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Persentase pemenuhan kebutuhan atas jasa, sarana dan prasarana kantor	Dinas Kesehatan Pengendalian penduduk dan KB
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Dinas Kesehatan Pengendalian penduduk dan KB
Penyediaan Jasa pelayanan umum kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Dinas Kesehatan Pengendalian penduduk dan KB

<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Persentase barang milik daerah yang dipelihara	Dinas Kesehatan Pengendalian penduduk dan KB, RSUD
Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Dinas Kesehatan Pengendalian penduduk dan KB
Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Dinas Kesehatan Pengendalian penduduk dan KB
<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>	<b>Cakupan SPM Kesehatan</b>	<b>Dinas Kesehatan Pengendalian penduduk dan KB</b>
<b>Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota</b>	<b>Persentase puskesmas yang memiliki sarana dan prasarana sesuai standar</b>	Dinas Kesehatan Pengendalian penduduk dan KB
Rehabilitasi dan pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah sarana, prasarana dan alat kesehatan yang telah dilakukan rehabilitasi dan pemeliharaan	Dinas Kesehatan Pengendalian penduduk dan KB
Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	Dinas Kesehatan Pengendalian penduduk dan KB
Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	Dinas Kesehatan Pengendalian penduduk dan KB
Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	Dinas Kesehatan Pengendalian penduduk dan KB
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	Dinas Kesehatan Pengendalian penduduk dan KB
Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman yang Didistribusikan ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Dinas Kesehatan Pengendalian penduduk dan KB
<b>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase pelayanan UKM dan UKP Rujukan</b>	<b>Dinas Kesehatan</b>
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Dinas Kesehatan Pengendalian penduduk dan KB
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Dinas Kesehatan Pengendalian penduduk dan KB
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Dinas Kesehatan Pengendalian penduduk dan KB

	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada anak Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Dinas Kesehatan Pengendalian penduduk dan KB
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Dinas Kesehatan Pengendalian penduduk dan KB
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Dinas Kesehatan Pengendalian penduduk dan KB
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Dinas Kesehatan Pengendalian penduduk dan KB
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Dinas Kesehatan Pengendalian penduduk dan KB
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan orang dengan resiko terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Dinas Kesehatan Pengendalian penduduk dan KB
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dinas Kesehatan Pengendalian penduduk dan KB
	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Dinas Kesehatan Pengendalian penduduk dan KB
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Dinas Kesehatan Pengendalian penduduk dan KB
	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Dinas Kesehatan Pengendalian penduduk dan KB
	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Dinas Kesehatan Pengendalian penduduk dan KB
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	Dinas Kesehatan Pengendalian penduduk dan KB
	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan Pengendalian penduduk dan KB
	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	Dinas Kesehatan Pengendalian penduduk dan KB
	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Dinas Kesehatan Pengendalian penduduk dan KB
	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Dinas Kesehatan Pengendalian penduduk dan KB
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	Dinas Kesehatan Pengendalian penduduk dan KB
	<b>Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi</b>	Persentase Puskesmas yang menyampaikan laporan yang sesuai standar dan tepat waktu	Dinas Kesehatan Pengendalian penduduk dan KB, RSUD

	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Dinas Kesehatan Pengendalian penduduk dan KB
	<b>Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D serta fasilitas pelayanan kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase fasyankes yang terkredensialing</b>	<b>Dinas Kesehatan Pengendalian penduduk dan KB</b>
	Peningkatan mutu pelayanan fasilitas kesehatan	Jumlah Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar	Dinas Kesehatan Pengendalian penduduk dan KB
	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN</b>	<b>Persentase RT yang melaksanakan Germas</b>	<b>Dinas Kesehatan Pengendalian penduduk dan KB</b>
	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase UKBM aktif	Dinas Kesehatan Pengendalian penduduk dan KB
	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Dinas Kesehatan Pengendalian penduduk dan KB
	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN</b>	<b><i>Persentase SDM yang bermutu dan sesuai kompetensi</i></b>	<b>Dinas Kesehatan Pengendalian penduduk dan KB</b>
	<b>Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM Manusia di Wilayah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase Pemenuhan SDM dan kompetensi sesuai standar</b>	<b>Dinas Kesehatan Pengendalian penduduk dan KB</b>
	Pembinaan dan pengawasan Sumber daya manusia kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Dinas Kesehatan Pengendalian penduduk dan KB
	<b>Pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi teknis sumber daya manusia kesehatan tingkat daerah kabupaten/kota</b>	<b>Persentase SDM yang bermutu dan sesuai kompetensi</b>	<b>Dinas Kesehatan Pengendalian penduduk dan KB, RSUD</b>
	Pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi teknis sumber daya manusia kesehatan tingkat daerah kabupaten/kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	Dinas Kesehatan Pengendalian penduduk dan KB
	<b>PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN</b>	<b><i>Persentase sediaan farmasi, alat kesehatan dan pengawasan makanan/minuman yang sesuai standar</i></b>	<b>Dinas kesehatan, pengendalian penduduk dan KB</b>

	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Persentase Apotek, Toko Obat, Optik dan UMOT yang memiliki izin	Dinas kesehatan, pengendalian penduduk dan KB
	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Dinas Kesehatan Pengendalian penduduk dan KB
	Penerbitan sertifikat laik higiene sanitasi tempat pengolahan makanan (TPM) antara lain jasa boga, Rumah Makan/Restoran, dan Depot Air Minum (DAM)	Persentase TPM yang memiliki sertifikat laik higiene sanitasi	Dinas kesehatan, pengendalian penduduk dan KB
	Pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan penerbitan sertifikat laik higiene sanitasi tempat pengolahan makanan (TPM) antara lain jasa boga, Rumah Makan/Restoran, dan Depot Air Minum (DAM)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Dinas Kesehatan Pengendalian penduduk dan KB
<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA</b>			
<b>PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK</b>		<b>Jumlah Kebijakan Yang Mendukung Pembangunan Pengendalian Penduduk</b>	<b>Dinas Kesehatan Pengendalian penduduk dan KB</b>
	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Dalam Rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Persentase Sektor Pendukung Kebijakan Pengendalian Penduduk	Dinas Kesehatan Pengendalian penduduk dan KB
	Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota terhadap Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (Program KKBPK)	Jumlah pertemuan lintas sektor di tingkat Kabupaten	Dinas Kesehatan Pengendalian penduduk dan KB
	Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal	Jumlah Sekolah Siaga Kependudukan Yang terbentuk	Dinas Kesehatan Pengendalian penduduk dan KB
	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Data Mikro Keluarga	Dinas Kesehatan Pengendalian penduduk dan KB
	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Jumlah PLKB, PPKBD dan Sub PPKBD Pelaksana Sistem Informasi Keluarga	Dinas Kesehatan Pengendalian penduduk dan KB
<b>PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)</b>		<b>Persentase Pemakaian Kontrasepsi (CPR)</b>	<b>Dinas Kesehatan Pengendalian penduduk dan KB</b>
	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Persentase Masyarakat Yang Terpapar Isi Program Bangga Kencana	Dinas Kesehatan Pengendalian penduduk dan KB
	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK - melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan	Jumlah Pertemuan Mekanisme Operasional Program KKBPK	Dinas Kesehatan Pengendalian penduduk dan KB

	Mini Lokakarya (Minilok)		
	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi Serta Pelaksanaan Pelayanan KB Di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Sarana dan Prasarana Yang Tersedia	Dinas Kesehatan Pengendalian penduduk dan KB
	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Sarana dan Prasarana Klinik Pelayanan KB	Dinas Kesehatan Pengendalian penduduk dan KB



## **BAB IV**

### **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

#### **4.1. Program dan Kegiatan Prioritas Perangkat Daerah**

Program Prioritas yaitu program yang diselenggarakan oleh SKPD yang merupakan program prioritas baik secara langsung maupun tidak langsung mendukung capaian program pembangunan daerah atau prioritas dan sasaran pembangunan daerah, serta berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan dasar dan syarat layanan minimal. Suatu program prioritas pada prinsipnya dibagi menjadi:

1. Program Prioritas I : Merupakan program prioritas pembangunan daerah Tahun 2025 sesuai dengan pentahapan tema RPJMD atau program unggulan Kabupaten Humbang Hasundutan;
2. Program Prioritas II : Merupakan program prioritas pembangunan daerah dalam rangka pencapaian Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2025 serta indikatornya;
3. Program Prioritas III : Merupakan prioritas program ditingkat SKPD yang berhubungan dengan permasalahan layanan dasar dan tugas/fungsi tiap SKPD.

Program prioritas yang berhubungan dengan prioritas pembangunan daerah mengacu pada program prioritas pembangunan RPJMD Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2021-2026, dimana prioritas program tersebut telah menggambarkan target indikator capaian kinerja beserta pagu indikatif selama 5 (lima) tahun. Program prioritas pembangunan daerah RPJMD oleh SKPD dijabarkan dalam Renstra SKPD, masing-masing program diuraikan kedalam kegiatan disertai pagunya. Selanjutnya di RKPD, dalam hal terjadi perhitungan kapasitas keuangan daerah tahun rencana yang berbeda dengan perhitungan RPJMD maka atas kelebihan/kekurangan dana pagu tersebut dialokasikan untuk program/kegiatan alternatif dan program kegiatan baru.

Suatu program kegiatan baru yaitu program dan kegiatan yang tidak tercantum pada renstra SKPD dengan kriteria sebagai berikut:

1. Tidak bisa ditunda karena dapat menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah maupun masyarakat;

2. Dalam rangka mempercepat capaian sasaran SKPD;
3. Adanya kebijakan pemerintah yang menjadi prioritas nasional yang mendukung percepatan pembangunan daerah;
4. Dilakukan jika kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan sebelumnya belum memberikan keluaran dan hasil yang sesuai dengan sasaran Renstra SKPD.

Elemen-elemen utama program prioritas memuat kegiatan yang akan dilaksanakan, kerangka waktu pelaksanaan dan SKPD yang bertanggungjawab. Program yang disusun harus dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan keterbatasan waktu, anggaran, kapasitas dan sumberdaya yang dimiliki daerah. Setiap program prioritas harus memiliki indikator kinerja yang jelas dan dapat diukur tingkat capaiannya. Pencapaian kinerja program merupakan akumulasi dari pencapaian kinerja keluaran masing-masing kegiatan. Program prioritas dan pagu indikatif yang telah ditetapkan untuk rancangan awal RKPD, disampaikan ke SKPD sesuai program terkait beserta pagu indikatif untuk diproses lebih lanjut untuk mendapatkan kegiatan prioritas masing-masing program dimaksud.

Dalam penyusunan prioritas kegiatan SKPD juga memperhatikan kegiatan yang telah disusun dalam dokumen Renstra SKPD sehingga terjadi keselarasan dalam penyusunan program dan kegiatan yang telah disusun oleh Pemerintah Daerah dan SKPD. Program, capaian kinerja, beserta pagu indikatifnya, yang mengacu pada RPJMD Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2021-2026 sebagaimana yang tercantum pada lampiran RKPD Tahun 2025 ini.

#### **4.2. Program dan Kegiatan Perangkat Daerah**

Rencana Kerja Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2025 diharapkan dapat mewujudkan tujuan dan sasaran Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Pendanaan program dan kegiatan Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2025 didanai dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Pendapatan Lain-lain yang Sah dengan pagu indikatif sebesar Rp. **108.185.202.687,-**, dengan rincian yang tertera dalam tabel TC. 33 berikut ini:

**RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)**  
**DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**  
**HUMBANG HASUNDUTAN**  
**TAHUN 2025**

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	RENCANA TAHUN 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1	2					3	4	10	8	9	11		15	16
						DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA			103.496.297.303				142.478.500.000	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			103.496.297.303				142.478.500.000	
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			103.496.297.303				142.478.500.000	
1	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	<i>Persentase kepuasan ASN terhadap dukungan manajemen perkantoran</i>		95%	56.525.073.607	<i>Persentase kepuasan ASN terhadap dukungan manajemen perkantoran</i>	95%	57.240.500.000	
	1	02	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<i>Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja tepat waktu</i>		95%	12.264.000	Persentase Dokumen perencanaan yang sesuai renstra	95Persen	13.000.000	
	1	02	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Humbang Hasundutan, Semua Kecamatan, Semua	6 Dokumen	12.264.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	7 Dokumen	13.000.000	

								Kel/Desa						
	1	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pembayaran gaji dan tunjangan serta penyampaian laporan keuangan tepat waktu		95%	54.745.390.004	Persentase pembayaran gaji dan tunjangan serta penyampaian laporan keuangan tepat waktu		95%	55.000.000.000
	1	02	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Humbang Hasundutan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	580 Orang/bulan	54.745.390.004	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		737	55.000.000.000
	1	02	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase ketepatan penyusunan laporan barang milik daerah		95%	7.468.690			95Persen	7.500.000
	1	02	01	2.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Humbang Hasundutan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	13 Laporan	7.468.690	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		13 Laporan	7.500.000
	1	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi umum		95%	1.016.158.633			95Persen	1.300.000.000
	1	02	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab. Humbang Hasundutan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15 Paket	72.807.060	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		25 Paket	100.000.000
	1	02	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Humbang Hasundutan, Semua Kecamatan, Semua	13 Paket	246.786.573	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		140 Paket	250.000.000

							Kel/Desa							
	1	02	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kab. Humbang Hasundutan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Paket	127.329.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		4 Paket	300.000.000
	1	02	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Humbang Hasundutan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	13 Paket	39.250.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		12 Paket	50.000.000
	1	02	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Humbang Hasundutan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	13 Laporan	529.986.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		3705 Laporan	600.000.000
	1	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan atas jasa, sarana dan prasarana kantor		95%	344.627.280			95Persen	320.000.000
	1	02	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Humbang Hasundutan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	13 Laporan	266.420.800	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		12 Laporan	250.000.000
	1	02	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Humbang Hasundutan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	14 Laporan	78.206.480	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		13 Laporan	70.000.000

	1	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang dipelihara		95%	399.165.000			95Persen	600.000.000
	1	02	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kab. Humbang Hasundutan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	17 Unit	300.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM			500.000.000
	1	02	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kab. Humbang Hasundutan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	14 Unit	99.165.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		250 Unit	100.000.000
2	1	02	02			<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>	<b>Persentase Capaian SPM Kesehatan</b>		<b>95%</b>	<b>45.443.060.296</b>			-	<b>83.243.000.000</b>
	1	02	02	2.01		<b>Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase puskesmas yang memiliki sarana dan prasarana sesuai standar</b>		<b>85%</b>	<b>7.001.096.992</b>			<b>85persen</b>	<b>9.585.000.000</b>
	1	02	02	2.01	0010	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya	Kab. Humbang Hasundutan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3 Unit	1.225.200.000	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK		0 Unit	1.500.000.000
	1	02	02	2.01	0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	Kab. Humbang Hasundutan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	13 Unit	2.393.130.250	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK		12 Unit	4.000.000.000

1	02	02	2.01	0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	Kab. Humbang Hasundutan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	13 Unit	54.013.000	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	12 Unit	55.000.000
1	02	02	2.01	0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	Kab. Humbang Hasundutan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10 Paket	3.089.120.376	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	24 Paket	3.700.000.000
1	02	02	2.01	0024	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatan oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	Kab. Humbang Hasundutan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	41000 Keluarga	35.108.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	41000 Keluarga	80.000.000
1	02	02	2.01	0026	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan	Kab. Humbang Hasundutan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Paket	204.525.366	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	144 Paket	250.000.000
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelayanan UKM dan UKP Rujukan		84%	37.446.065.904		84persen	72.408.000.000

	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kab. Humbang Hasundutan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3752 Orang	595.864.000	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK, DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNY A BIDANG KESEHATAN	3725 Orang	1.000.000.000
	1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kab. Humbang Hasundutan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3556 Orang	137.933.000	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	3556 Orang	150.000.000
	1	02	02	2.02	0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kab. Humbang Hasundutan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15344 Orang	138.872.800	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNY A BIDANG KESEHATAN	14500 Orang	120.000.000
	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kab. Humbang Hasundutan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	42356 Orang	307.690.400	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK, DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNY A BIDANG KESEHATAN	27354 Orang	350.000.000
	1	02	02	2.02	0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kab. Humbang Hasundutan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	94040 Orang	63.855.000	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNY A BIDANG KESEHATAN	33100 Orang	70.000.000
	1	02	02	2.02	0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kab. Humbang Hasundutan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	29160 Orang	29.438.520	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNY A BIDANG KESEHATAN	24083 Orang	30.000.000

	1	02	02	2.02	0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kab. Humbang Hasundutan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	942 Orang	240.328.100	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK		735 Orang	250.000.000
	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Kab. Humbang Hasundutan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3445 Orang	782.559.300	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK, DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN		650 Orang	800.000.000
	1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Kab. Humbang Hasundutan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5779 Orang	135.310.000	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK, DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN		3000 Orang	160.000.000
	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Kab. Humbang Hasundutan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	156 Dokumen	2.880.414.000	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK		144 Dokumen	3.500.000.000
	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Kab. Humbang Hasundutan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	168 Dokumen	628.678.500	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK		144 Dokumen	600.000.000

	1	02	02	2.02	0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Kab. Humbang Hasundutan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	168 Dokumen	314.664.700	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	144 Dokumen	450.000.000
	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Kab. Humbang Hasundutan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	156 Dokumen	594.742.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	144 Dokumen	650.000.000
	1	02	02	2.02	0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	Kab. Humbang Hasundutan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3000 Orang	121.994.400	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK		80.000.000
	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Kab. Humbang Hasundutan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	156 Dokumen	2.350.065.391	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	144 Dokumen	2.400.000.000
	1	02	02	2.02	0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Kab. Humbang Hasundutan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Dokumen	24.724.588.793	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	12 Dokumen	58.000.000.000
	1	02	02	2.02	0028	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	Kab. Humbang Hasundutan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Paket	7.500.000	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK		8.000.000

	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Kab. Humbang Hasundutan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	156 Dokumen	3.137.473.000	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK		12 Dokumen	3.500.000.000
	1	02	02	2.02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Kab. Humbang Hasundutan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Laporan	71.900.000	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK		25 Laporan	80.000.000
	1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	Kab. Humbang Hasundutan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	144 Dokumen	182.194.000	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK			210.000.000
	1	02	02	2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Persentase Puskesmas yang menyampaikan laporan yang sesuai standar dan tepat waktu		94%	758.303.800			94persen	600.000.000
	1	02	02	2.03	0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Kab. Humbang Hasundutan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	157 Dokumen	758.303.800	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK		144 Dokumen	600.000.000
	1	02	02	2.04		Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase fasyankes yang terakreditasi		100%	237.593.600			100persen	650.000.000

	1	02	02	2.04	0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan	Kab. Humbang Hasundutan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	13 Unit	237.593.600	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		12 Unit	650.000.000
3	1	02	03			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase SDM yang bermutu dan sesuai kompetensi		53%	1.255.710.800			-	1.700.000.000
	1	02	03	2.02		Perencanaan Kebutuhan dan Pdayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan SDM dan Kompetensi sesuai standar		25%	329.695.800			30 persen	400.000.000
	1	02	03	2.02	0003	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Kab. Humbang Hasundutan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	13 Dokumen	329.695.800	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK		12 Dokumen	400.000.000
	1	02	03	2.03		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase SDM yang memiliki sertifikat kompetensi		78%	926.015.000			78persen	1.300.000.000
	1	02	03	2.03	0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	Kab. Humbang Hasundutan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50 Orang	926.015.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK		80 Orang	1.300.000.000
4	1	02	04			PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase sediaan farmasi, alat kesehatan dan pengawasan makanan/minuman yang sesuai standar		55%	76.516.600			50%	95.000.000

	1	02	04	2.01		Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Persentase Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang memiliki izin		80%	60.622.000			80persen	65.000.000
	1	02	04	2.01	0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Kab. Humbang Hasundutan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	60.622.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		30 Dokumen	65.000.000
	1	02	04	2.04		Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	<i>Persentase TPM yang memiliki sertifikat laik higiene sanitasi</i>		30%	15.894.600			30persen	30.000.000
	1	02	04	2.04	0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM)	Kab. Humbang Hasundutan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	15.894.600	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		50 Dokumen	30.000.000



							Nonformal	Kel/Desa						
	2	14	02	2.01	0020	Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota terhadap Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)	Jumlah Dokumen Hasil Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	Kab. Humbang Hasundutan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Dokumen	123.515.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Dokumen	200.000.000
	2	14	02	2.02		Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	<b>Persentase Data Mikro Keluarga</b>		90%	253.710.000			100PERSEN	90.000.000
	2	14	02	2.02	0009	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Kab. Humbang Hasundutan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Laporan	253.710.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK		337 Laporan	90.000.000
7	2	14	03			PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	<b>Persentase Akseptor KB</b>		80%	4.247.440.384			-	4.500.000.000
	2	14	03	2.01		Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	<b>Persentase Masyarakat Yang terinformasi advokasi/KIE</b>		75%	3.947.448.384			80PERSEN	4.200.000.000

	2	14	03	2.01	0011	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Kab. Humbang Hasundutan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Laporan	3.947.448.384	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	20 Laporan	4.200.000.000
	2	14	03	2.03		Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	<b>Persentase Sarana dan Prasarana Yang Tersedia</b>		95%	299.992.000		100Persen	300.000.000
	2	14	03	2.03	0006	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB	Kab. Humbang Hasundutan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5 Unit	299.992.000	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	65 Unit	300.000.000
<b>J U M L A H</b>										<b>108.185.202.687</b>			<b>147.333.500.000</b>

## **BAB V PENUTUP**

### **5.1. Kesimpulan**

Rencana Kerja Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2025 ini diharapkan dapat dipakai sebagai acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian upaya Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam kurun waktu satu tahun. Rancangan Akhir Rencana Kerja ini disusun sedemikian rupa sehingga hasil pencapaiannya dapat diukur dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan kinerja tahunan Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Mengingat perubahan lingkungan yang sangat kompleks, pesat dan tidak menentu, maka selama kurun waktu berlakunya Rencana Kerja ini, dapat dilakukan upaya kajian dan bila perlu dilakukan penyesuaian-penyesuaian seperlunya.

Selanjutnya Rencana Kerja Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2025 ini hanya dapat dilaksanakan dan tercapai tujuannya, bila dengan dedikasi dan kerja keras, terutama semua aparatur kesehatan di lingkungan Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Humbang Hasundutan.

### **5.2 Saran**

Peningkatan upaya kesehatan perlu dilakukan melalui peningkatan SDM, sumber dana serta sumber daya lainnya, dengan meningkatkan upaya kerja sama atau kemitraan lintas program dan lintas sektoral serta adanya peningkatan peran serta dari masyarakat.

**Plt. KEPALA DINAS KESEHATAN,  
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN  
KELUARGA BERENCANA**

**dr.GUNAWAN P. SINAGA  
NIP. 19850620 201101 1 013**

